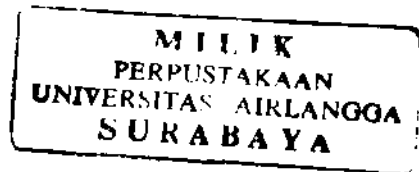


**TESIS**

**KEMAMPUAN DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL MENENGAH  
DALAM MEMBINA USAHA KECIL / KOPERASI  
DI KABUPATEN MOJOKERTO**



**ILHAMI**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**TESIS**

**KEMAMPUAN DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL MENENGAH  
DALAM MEMBINA USAHA KECIL / KOPERASI  
DI KABUPATEN MOJOKERTO**



**ILHAMI**

**M I L I K  
P E R P U S T A K A A N  
U N I V E R S I T A S A I R L A N G G A  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**KEMAMPUAN DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL MENENGAH  
DALAM MEMBINA USAHA KECIL / KOPERASI  
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**TESIS**

untuk memperoleh gelar magister  
dalam program studi pengembangan Sumber Daya Manusia  
pada program pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :

**ILHAMI**

NIM. 099 913.367. M

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

Tanggal 18 Februari 2002

**TESIS**

**KEMAMPUAN DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL MENENGAH  
DALAM MEMBINA USAHA KECIL / KOPERASI  
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**ILHAMI**

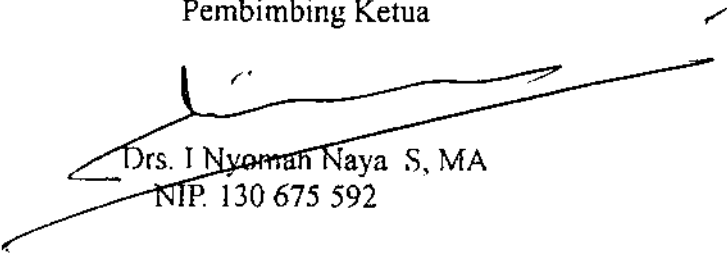
**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

Lembar pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 10 JANUARI 2002


Oleh

Pembimbing Ketua



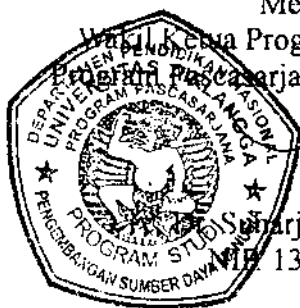
Drs. I Nyoman Naya S, MA  
NIP. 130 675 592

Pembimbing




Dr.s. Djarot Santoso, MA  
NIP. 380 000 093

Mengetahui



Wakil Ketua Program Studi Ilmu PSDM  
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Sunarjo, dr, M.S, M.Sc  
NIP. 130 685 841

Telah diuji pada

Tanggal 18 Pebruari 2002

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua** : Dr. Sunarjo, dr MS. Msc

**anggota** : 1. Prof. Dr. Sri Kardjati, dr, Msc

2. Drs. Suryanto, Msi

3. Drs. I Nyoman Naya, S..MA

4. Drs. Djarot Santoso, MA

5. Ir. Kardani, MM

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha pengasih lagi maha penyayang karena atas racmad dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat di selesaikan dengan baik.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

Drs. I Nyoman Naya, S.MA selaku pembimbing ketua dan Drs. Djarot Santoso, MA selaku pembimbing yang dengan penuh kesungguhan dan kesabaran memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Med Puruhito, dr atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

Mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Dr. Soedijono, dr yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Magister.

Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. H. Muhamad Amin, dr, SpP(k), Asisten direktur dan satf khusus atas kesempatan kepada saya untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada program Pascasarjana Universitas Airlangga

Ketua Program Study Ilmu Pengembangan sumberdaya manusia Prof. Dr. H. Haryono suyono, MA, Phd atas kesempatan yang di berikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Magister.

Seluruh Staf Dosen yang telah membekali pengetahuan melalui kuliah dan tugas-tugas, serta tenaga administrasi yang selalu memberikan kemudahan selama menjalankan studi sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Ketua Tim dan anggota penguji tesis yang telah memberikan saran, masukan dan pencerahan yang sangat bermanfaat guna penyempurnaan tesis ini.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan ijin penelitian serta memberikan data-data untuk penelitian tesis ini.

Ayahanda K. Ach Gufron (almarhum), ibunda Darmisah (almarhumah), ayahanda mertua Taridjan (almarhum) ibu mertua Hj. Sri Wuryan yang membesarkan dan selalu mendoakan setiap saat kepada saya.

Teristimewa kepada istri tersayang Hj. Sri Utami, Spd, yang selalu mandampingi dan selalu bersama-sama dalam menempuh dan menyelesaikan Program Magister, serta anak-anakku Ir. G. Ikka Wijaya, Cahaya Wijaya, STTP, Dian Wijaya, S.Sos yang membantu sepenuhnya dalam penyelesaian tesis ini.

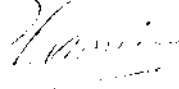
Rekan-rekan mahasiswa Program Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia angkatan 1999/2000, merupakan angkatan pertama peminatan Pemerintah kelas khusus yang telah memberikan dorongan dan rasa kebersamaan dan penuh kekeluargaan dalam menjalani masa perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung keberhasilan saya dalam menyelesaikan pendidikan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan iringan do'a semoga Allah membalas-Nya dengan berlipat ganda dan memberikan limpahan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah saya sebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam ucapan terima kasih ini.

Akhirnya harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan merupakan masukan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dan pihak-pihak yang terkait umumnya.

Sutabaya, 28 Januari 2002

Penulis



**ILHAMI**



## RINGKASAN

Usaha kecil/koperasi jumlahnya sangat banyak tersebar luas di masyarakat, memiliki ketangguhan dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 sampai saat ini. Selama ini pembinaan terhadap usaha kecil / koperasi oleh Pemerintah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah belum dilakukan dengan baik, sehingga keadaan usaha kecil / koperasi tertinggal dengan pelaku ekonomi dan usaha lainnya.

Melalui penelitian ini dapat diketahui, di gambarkan dan dianalisis kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto dalam membina usaha kecil/ koperasi pada tahun 2001. Tujuan penelitian menjadikan usaha kecil/ koperasi menjadi tangguh dan mandiri sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan saat ini maupun pada masa mendatang.

Jenis penelitian kualitatif, fokus penelitian kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam membentuk Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah pemberdayaan kemampuan : sumber daya manusia aparatur, kuantitas, kualitas, sarana prasarana, program kerja, anggaran keuangan. Keadaan usaha kecil / koperasi meliputi : sumber daya manusia pengusaha, jenis usaha, pemodal, omzet penjualan, penyerapan kerja, pemasaran serta permasalahan yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dokumentasi, kuesioner, sedangkan analisis data mengacu pada konsep model interaktif dan teknik keabsahan data meliputi : kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, kepastian.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kebijakan pembentukan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto telah di siapkan sumber daya manusia aparatur dengan baik, program kerja yang baik sarana prasarana sedang anggaran dana kurang dan diikuti langkah evaluasi melalui analisis jabatan/ pekerjaan keadaan usaha kecil/ koperasi : tingkat pendidikan pengusaha/ pengurus rendah, sebagian besar belum pernah mengikuti pembinaan, sebagian besar bergerak dalam usaha non pertanian modal usaha kecil, omzet pembulatan rendah, penyerapan tenaga kerja cukup banyak, pemasaran terbatas di dalam negeri dan permasalahan yang di hadapi adalah keterbatasan modal, pemasaran, peralatan dan bahan baku.

Dari penelitian dapat ditemukan bahwa capaian pelaksanaan program dinas koperasi pengusaha kecil dan menengah Kabupaten Mojokerto 2001 dari aspek kegiatan rutin menunjang kelancaran tugas tepat waktu  $\pm 71,08$  % atau sedang. Pembinaan koperasi peningkatan identitas koperasi sebagai badan usaha capaian pelaksanaan program  $\pm 84,16$  % atau baik. Pembinaan usaha kecil dan menengah optimalisasi peran pengusaha kecil dan menengah dalam penyempurnaan pasar dan permodalan capaian pelaksanaan program  $\pm 76,27$  % atau sedang.

Kendala dalam pembinaan usaha kecil/ koperasi : kurangnya staf yang membina di kecamatan dan desa, pembinaan belum optimal, kurang dukungan dana APBD II, sumber daya manusia pengusaha kecil/ koperasi rendah, banyaknya permasalahan yang dihadapi usaha kecil/ koperasi.

Saran yang disampaikan dalam penelitian : peningkatan dukungan pemerintah/ DPRD dalam penambahan sarana-prasarana, dana anggaran, peningkatan pembinaan, teknis pembinaan dengan memperhatikan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, kunci keberhasilan. Untuk meningkatkan capaian pelaksanaan program pembinaan usaha kecil/ koperasi pada masa mendatang disarankan penggunaan model akuntabilitas instansi pemerintah.

## DAFTAR ISI

Sampul Depan.....	i
Sampul Dalam.....	ii
Prasyarat Gelar.....	iii
Persetujuan.....	iv
Penetapan Panitia Penguji.....	v
Ucapan terima kasih.....	vi
Ringkasan.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1. Penelitian Sebelumnya.....	5
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	10
2.3. Pengertian Kemampuan dan Pembinaan.....	11
2.4. Unsur Dasar Kemampuan.....	11
2.5. Pedoman Pelaksanaan Pembinaan.....	14
<b>BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	<b>17</b>
<b>BAB 4 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
4.1. Rancangan Penelitian.....	20
4.2. Fokus Penelitian.....	21
4.3. Lokasi dan Situs Penelitian.....	21
4.4. Teknik dan Sumber Data Penelitian.....	22
4.5. Analisis Data.....	24
4.6. Keabsahan Data.....	24
<b>BAB 5 HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
5.1. Gambar Umum.....	26
5.2. Kemampuan Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah.....	27
5.2.1. Struktur Organisasi.....	27
5.2.2. Sumber Daya manusia Aparatur.....	32
5.2.3. Sarana Prasarana.....	36
5.2.4. Program Kerja.....	37
5.2.5. Anggaran.....	45
5.3. Usaha Kecil/Koperasi di Kabupaten Mojokerto.....	58
5.3.1. Kriteria Usaha Kecil.....	58
5.3.2. Data Usaha kecil.....	59
5.3.3. Koperasi.....	65
5.3.4. Data Koperasi.....	67

5.3.5. Pembinaan Usaha Kecil/Koperasi .....	70
<b>BAB 6 PEMBAHASAN</b> .....	84
6.1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto .....	86
6.2. Perencanaan Strategik.....	88
6.3. Analisa SWOT terhadap kemampuan Dinas koperasi pengusaha kecil dan Menengah dalam membina Usaha kecil/koperasi.....	89
6.3.1. Visi dan Misi .....	90
6.3.2. Analisis internal .....	92
6.3.3. Analisis eksternal .....	94
6.3.4. Faktor Kunci Keberhasilan .....	96
6.4. Analisis Akuntabilitas .....	100
6.3.1. Indikator Capaian Pelaksanaan Program .....	100
6.3.2. Capaian pelaksanaan program .....	102
6.4. Referensi dengan hasil Penelitian sebelumnya .....	104
<b>BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	107
7.1. Kesimpulan .....	107
7.2. Saran-saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113
<b>LAMPIRAN</b> .....	117

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tingkat kemampuan dinas koperasi PKM dalam pembinaan usaha kecil/ koperasi.....	13
Tabel 2.2 : Tingkat kemampuan / kematangan SDM aparatur.....	14
Tabel 5.1 : Perbedaan antara struktur organisasi kantor departemen koperasi pengusaha kecil dengan dinas koperasi pengusaha kecil dan menengah.....	32
Tabel 5.2 : Data SDM aparatur dinas koperasi PKM berdasarkan golongan kepangkatan.....	33
Tabel 5.3 : Data SDM aparatur dinas koperasi PKM berdasarkan latar belakang pendidikan.....	33
Tabel 5.4 : Data formasi jabatan dan persyaratan pendidikan penjejjangan.....	34
Tabel 5.5 : Data SDM aparatur dinas koperasi PKM ditinjau dari masa kerja	34
Tabel 5.6 : Data SDM aparatur dinas koperasi PKM yang mengikuti pendidikan teknis fungsional tahun 2001.....	34
Tabel 5.7 : Pendidikan teknis perkoperasian aparatur dinas koperasi PKM...	35
Tabel 5.8 : Keadaan SDM aparatur dinas koperasi PKM tahun 2000 dan 2001.....	36
Tabel 5.9 : Sarana-prasarana / infentaris dinas koperasi PKM.....	37
Tabel 5.10 : daftar belanja non pegawai dinas koperasi PKM tahun anggaran 2000 dan 2001.....	46
Tabel 5.11 : proyek peningkatan produktivitas PKM APBN TA 2001.....	48
Tabel 5.12 : proyek identivikasi PKM dan penciptaan jaringan usaha APBD II tahun anggaran 2001.....	50
Tabel 5.13 : Proyek peningkatan iklim pendukung usaha PKMK dana APBN tahun anggaran 2001.....	52
Tabel 5.14 : Proyek peningkatan produktivitas pendukung usaha PKMK dana APBN tahun anggaran 2001.....	54
Tabel 5.15 : Daftar usaha kecil/koperasi yang diusulkan bantuan BUMN tahun 2001.....	55
Tabel 5.16 : Kemampuan dinas koperasi UKM Kabupaten Mojokerto tahun 2001.....	57
Tabel 5.17 : Data usaha kecil di Kabupaten Mojokerto.....	60
Tabel 5.18 : Data usaha kecil/koperasihil penelitian pada 18 Kecamatan se Kabupaten Mojokerto.....	62
Tabel 5.19 : Data usaha kecil/ koperasi produk unggulan ekspor.....	64
Tabel 5.20 : Keadaan koperasi di Kabupaten Mojokerto.....	69
Tabel 6.1 : Dafar usaha kecil/koperasi telah ekspor.....	95

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 : Pembinaan usaha kecil/koperasi .....	15
Gambar 3.1 : Kerangka konseptual .....	17
Gambar 4.1 : Analisis model interaktif.....	23
Gambar 5.1 : Struktur organisasi dan tata kerja kantor departemen koperasi pengusaha kecil Kabupaten Mojokerto (Sesuai Kepmen. Kop. PPK Nomor 701/KEP/M/XII/1997).....	30
Gambar 5.2 : Struktur organisasi dan tata kerja dinas koperasi pengusaha kecil dan menengah kabupaten mojokerto (Sesuai SK BUPATI nomor 21 Tahun 2001).....	31
Gambar 6.1 : Model analisis SWOT.....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin melaksanakan penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan untuk melakukan survey/research
- Lampiran 3 : Surat Ijin mengadakan Penelitian dari Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto
- Lampiran 4 : Surat permohonan untuk menjadi responden dan daftar pertanyaan
- Lampiran 5 : Perda Kabupaten Mojokerto No. 3 tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Bupati Mojokerto No. 21 tahun 2001 tentang penjabaran Tugas pokok dan Fungsi
- Lampiran 7 : Program kerja Dinas koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2001
- Lampiran 8 : Perencanaan Strategik tahun 2001 Dinas koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah kabupaten Mojokerto

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Usaha kecil di dalamnya termasuk koperasi adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan tertentu, seperti kriteria tersebut dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Adapun kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), c. milik warga negara Indonesia, d. berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, e. berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Selama Pemerintahan Orde Baru usaha kecil belum dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh, belum mampu berkembang menjadi pilar penting dan nyata dalam ekonomi nasional. Menurut penelitian, semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia banyak usaha besar gulung tikar. Justru usaha kecil berbasis sumber daya lokal dapat hidup *survival* (I Nyoman Naya S :2000: 10) usaha kecil yang bertahun - tahun disia - siakan karena dianggap tidak





memberikan kontribusi untuk perekonomian nasional kini mendapatkan perhatian, karena ketangguhannya dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi (S.I.:30-12:2000).

Potensi usaha kecil termasuk koperasi cukup besar di Jawa Timur terdapat 6.631.975 usaha kecil, 1.265 usaha menengah, koperasi 13.914 buah. Di Kabupaten Mojokerto terdapat 658 usaha kecil, menengah dan 318 koperasi.

Permasalahannya adalah, usaha kecil umumnya memiliki kelemahan-kelemahan yaitu : 1. masalah manajemen, 2. permodalan, 3. pemakaian teknologi, 4. penyediaan bahan baku, 5. pemrosesan hasil produksi, 6. desain dan kualitas produk, 7. infrastruktur, 8. birokrasi dan perijinan, 9. kemitraan kerja, 10. persaingan usaha dan produk, 11. masalah sumber daya manusia, 12. tenaga kerja, 13. pendidikan dan latihan, 14. lingkungan usaha, 15. mental psikologis, 16. masalah kondisi sosial dan keamanan (konperensi nasional usaha kecil : 1997).

Sedangkan masalah yang dihadapi koperasi adalah : permasalahan internal : 1. usaha-usaha perkoperasian belum layak, 2. penguasaan teknologi yang rendah, 3. kurang tanggap terhadap berbagai perubahan, 4. organisasi dan manajemen belum berjalan baik, 5. kurangnya kemitrausahaan yang saling menguntungkan. Permasalahan external : 1. iklim usaha kurang kondusif, disebabkan mekanisme pasar kurang sehat, pengaruh globalisasi yang berakibat lemahnya usaha koperasi dan makin berkembangnya sifat individualisme, 2. belum lancar koordinasi dan sinkronisasi pembinaan, 3. kurang jelas dan lancarnya perizinan, 4. kecenderungan pengusaha besar dan menengah

menginteraksikan usahanya dari usaha hilir ke hulu menyebabkan koperasi dan usaha kecil terdesak (pembinaan dan pengembangan koperasi dan pengusaha kecil menengah Jatim:1996).

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil termasuk koperasi, sesuai dengan undang-undang No. 9 tahun 1995 adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dunia usaha dan masyarakat. Adapun aspek pembinaan dan pengembangan meliputi : a. bidang produksi dan pengolahan, b. bidang pemasaran di dalam, luar negeri, c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, d. bidang teknologi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : a. usaha kecil/koperasi memiliki potensi besar apabila dibina dengan baik dapat menjadi pilar ekonomi nasional, b. usaha kecil/koperasi umumnya memiliki kelemahan-kelemahan baik kelemahan internal maupun eksternal, c. pembinaan dan pengembangan usaha kecil/koperasi menjadi tanggung jawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, d. pembinaan dan pengembangan usaha kecil/koperasi oleh pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan terus menerus berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mengetahui kemampuan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kemampuan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dalam membina usaha kecil/koperasi di Kabupaten Mojokerto."

## 1.2. Rumusan Masalah

Masalah umum dari penelitian ini adalah, sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto dalam membina usaha kecil/ koperasi. Masalah khusus yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ?
- b. Sejauh mana pembinaan usaha kecil/ koperasi ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pembinaan usaha kecil/ koperasi yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

## 1.4. Manfaat Penelitian

- a. Kontribusi Akademis

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan sumber daya manusia usaha kecil/koperasi.

- b. Kontribusi Praktis

Memberikan informasi, sumbang saran pemikiran untuk meningkatkan penyusunan kebijakan bagi Pemerintah Daerah/Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam membina usaha kecil/koperasi yang berdaya guna berhasil guna pada masa mendatang.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Sebelumnya

Rustam Effendy (1998), penelitian berjudul "Pemberdayaan usaha kecil menghadapi perdagangan bebas" dari penelitian yang dilakukan diungkapkan bahwa secara nasional usaha kecil memberikan kontribusi pada PDB sebesar 12,8% mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, namun terdapat banyak masalah. Masalah intern pada usaha kecil adalah : a. masalah kemampuan dalam mengembangkan pasar atas produk yang dihasilkan, b. masalah profesionalisme tenaga pengelola, c. permodalan, d. masalah perbankan dan pemasaran, e. kemampuan teknologi yang belum memadai. Masalah ekstern : a. iklim usaha yang belum baik, b. kebijakan pemerintah yang belum mulus, c. masalah fasilitas yang belum dilakukan, d. pembinaan manajemen, pelatihan dan konsultasi, e. masalah proteksi yang belum tepat.

Pemberdayaan usaha kecil bertujuan : a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah, b. meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat perekonomian nasional.

Usaha pemerintah dalam membina usaha kecil adalah : 1. pembentukan lembaga penjamin kredit usaha kecil, 2. fasilitas perbankan

(KUT, Bimas, KCK, KMKP, Kredit bakulan, KUK), 3. pembentukan Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), 4. pembentukan Proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok swadaya masyarakat (PPHBK), 5. Forum Komunikasi Perbankan untuk Pengembangan Usaha Kecil (FKPPUK), 6. sistim kemitraan usaha, 7. pembentukan perusahaan modal ventura, 8. dana pembinaan BUMN 1-5 persen dari keuntungan bersih, 9. kredit tanpa agunan (kredit kelayakan usaha), 10. penjualan saham perusahaan besar pada koperasi, 11. pembuatan undang-undang tentang usaha kecil.

Menghadapi era globalisasi usaha kecil diarahkan untuk dibina dengan baik sebagai pelaku ekonomi menghadapi persaingan bebas. Prasarat bagi usaha kecil yang perlu dimiliki antara lain : a. sistim manajemen yang baik, b. tingkat produktivitas tinggi, c. memiliki sistim mutu standar, d. memiliki akses pasar yang besar, e. bergerak pada bidang bisnis yang peluang pertumbuhannya relatif tinggi, f. memiliki akses sumber daya yang besar.

Salah satu kesimpulan penelitian tersebut adalah , bahwa usaha kecil masih tetap perlu diberikan pembinaan dan bimbingan oleh pemerintah dalam bidang kewirausahaan, manajemen, pemasaran, keuangan dan operasional perusahaan. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang di lakukan ini adalah pada obyek yang diteliti yaitu usaha kecil. Perbedaannya adalah, obyek penelitian sebelumnya mengenai pemberdayaan usaha kecil secara nasional dalam menghadapi perdagangan bebas. Sedangkan penelitian yang di lakukan, obyek penelitiannya adalah pembinaan oleh Dinas Koperasi dan PKM terhadap usaha kecil/koperasi di Kabupaten Mojokerto.

Djumilah Zain dan Khusnul Akbar (1998), penelitian berjudul "Pengalaman membina usaha kecil di Jawa Timur tinjauan aspek kelembagaan". Dari penelitian tersebut ditemukan permasalahan permodalan yang bersumber dari perbankan mensyaratkan pemberian kredit permodalan berazaskan kredit sehat. Persyaratannya adalah kelayakan usaha, adanya agunan, legalitas usaha, kemauan dan kemampuan membayar dan tertib administrasi keuangan. Aspek-aspek tersebut sangat sulit dipenuhi oleh pengusaha kecil, sehingga untuk mendapatkan permodalan dilakukan melalui para pelepas uang (rentenir).

Pembinaan usaha kecil yang dilakukan pemerintah melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memiliki tiga keburukan yaitu : 1. penggunaan bantuan modal yang diberikan BUMN tidak terarah, 2. kemampuan administrasi, manajemen ataupun teknik produksi yang diberikan oleh lembaga pembina walaupun berhasil dikuasai oleh para pengusaha kecil pada akhirnya tidak dipergunakan menjadi pendukung dalam berusaha, 3. dinamika kelompok, semangat kelompok melemah sesudah tahun pertama pembinaan. Ketiga kelemahan tersebut diduga bersumber pada pembinaan yang masih bersifat sporadis.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian : 1. untuk membina dan mengembangkan usaha kecil diperlukan lembaga yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri lembaga tersebut : luwes, tidak birokratis, bersifat *bottom up*, mandiri, mempunyai pola perencanaan dan evaluasi yang jelas dan memiliki kemampuan membangun sikap mental pengusaha kecil menjadi wirausahawan, 2. kelembagaan yang efektif adalah kelembagaan yang mampu

mengakomodasi kepentingan usaha secara tepat (bentuk, jumlah dan waktu), 3. komitmen masing-masing pihak, serta adanya rasa kepedulian terhadap orang kecil merupakan unsur yang sangat penting dalam menunjang pengembangan usaha kecil, 4. adanya hubungan kekeluargaan yang erat antara pembina dengan yang dibina dan antar sesama anggota binaan adalah faktor yang menunjang keberhasilan pembinaan, 5. pelaksanaan pembinaan tidak boleh terputus-putus, harus dilakukan secara terus menerus, 6. adanya aturan main yang jelas dan dimengerti oleh pihak yang terlibat dalam pembinaan akan lebih memantapkan peran serta masing-masing pihak secara optimal.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada obyeknya yaitu pembinaan usaha kecil, sedangkan perbedaannya adalah : a. keluasan obyek penelitian pembinaan usaha kecil di beberapa daerah Tingkat II Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten Mojokerto). Sedangkan penelitian yang dilakukan pembinaan usaha kecil/koperasi di Kabupaten Mojokerto, b. penelitian tersebut, tinjauannya pada aspek kelembagaan.

I. Nyoman Naya Sudjana, (2001), penelitian berjudul “ Pengusaha kecil yang berbasis sumber daya lokal”. Lokasi penelitian meliputi beberapa daerah di Jawa Timur. Temuan-temuan yang didapat antara lain : 1. sebagian besar usaha kecil adalah usaha keluarga/usaha kekerabatan, 2. belum dilakukan pengelolaan sesuai asas ekonomi formal, melainkan asas sosial budaya informal, 3. latar belakang pendidikan pengusaha kecil sebagian besar SD atau sederajat, 4. belum berkembang budaya niaga dan budaya ekonomis, cenderung budaya lokal berkarakter budaya agraris/petani, 5. pengembangan usaha kecil belum menjadi pilihan hidup yang formal, masih menjadi suatu respon terhadap

tidak adanya pilihan lain, 6. perhatian warga masyarakat terhadap usaha kecil sangat terbatas, sebatas sebagai usaha sampingan, 7. potensi pengembangan usaha kecil sangat luas dan besar, harus dimulai dari keberanian membuka usaha, kerja keras dan ulet, kesediaan untuk memperoleh pengalaman, hidup hemat, membuka diri untuk wawasan baru, kemudian dibutuhkan ketrampilan khusus, pemilikan modal yang cukup, 8. masalah dominan yang dihadapi usaha kecil adalah : a. manajemen *trial and error*, b. masalah modal dan pengelolaannya, c. pemasaran hasil usaha.

Naya Sudjana menyarankan “intervensi sistemik” pemerintah dan lembaga formal dalam kegiatan usaha kecil terutama dalam hal permodalan, transformasi teknologi modern tepat guna. Untuk memberikan pendidikan tentang kualitas produk dan standarisasi produk guna meningkatkan daya saing disarankan pendirian *Central For Small Industri Developmen (CSID)* di Jawa Timur.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah pada obyek yang diteliti yaitu menyangkut usaha kecil. Perbedaannya adalah sebagai berikut : a. penelitian tersebut lokasinya meliputi beberapa daerah tingkat II di Jawa Timur, tidak termasuk Kabupaten Mojokerto, sedangkan penelitian yang akan di lakukan lokasinya di Kabupaten Mojokerto, b. penelitian terdahulu mengamati pengusaha kecil berbasis sumber daya lokal, sedangkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Koperasi PKM dalam membina usaha kecil/koperasi.



## **2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor : 50/KEP/M/IV/1997 Tanggal 15 April 1997 Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah semula adalah merupakan instansi vertikal dengan sebutan Kantor Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kantor Departemen Koperasi dan PPK ditiadakan dan dibentuk dinas daerah baru bernama Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.

Melalui peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah dan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 221 tahun 2001 tanggal 5 April 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: 1. tugas pokok Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang koperasi pengusaha kecil dan menengah, 2. untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi: (a).melaksanakan penyusunan rencana program, (b).pelaksanaan pembinaan, (c).pelaksanaan penyuluhan pedoman teknis, (d).pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, (e).pelaksanaan pengembangan SDM koperasi, pengusaha kecil dan menengah, (f). pelaksanaan

tugas-tugas ketatausahaan, (g). pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

### **2.3. Pengertian Kemampuan dan Pembinaan**

Istilah kemampuan digunakan dalam penelitian ini artinya adalah sama dengan kesanggupan, kekuatan, potensi yang dimiliki oleh setiap organisasi terdiri dari potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (WJS.Poerwadarminta :1976 : 628 ).Selanjutnya dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan, potensi sumber daya manusia diperlukan pengelolaan yang baik berdayaguna berhasilguna.

Istilah pembinaan, pembangunan atau peningkatan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan usaha kecil/ koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri. (Departemen Koperasi dan PPK:1996 :2 )

### **2.4. Unsur Dasar Kemampuan**

Unsur dasar kemampuan adalah merupakan sumber daya yang dipergunakan dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan adalah segenap perbuatan untuk menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Balai Penelitian Administrasi UGM : 1968 : 158).Adapun unsur pengelolaan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan kegiatan, pengawasan.

Sejalan dengan itu, potensi sumber daya setiap organisasi terdiri dari sumber daya manusia , bahan , peralatan, metode dan uang . Potensi tersebut merupakan unsur dasar pengelolaan untuk mencapai tujuan organisasi. ( G R Terry dalam Sarwoto : 1979 : 7 ). Sementara itu pendapat O. F. Peterson membatasi potensi sumber daya setiap organisasi dengan meliputi: sumber daya manusia,sarana prasarana, keuangan, (Sarwoto:1979 : 46).

Dari dua pendapat tersebut di lakukan modifikasi, kemampuan organisasi terdiri dari : unsur sumber daya manusia , unsur sarana-prasarana unsur program kerja dan unsur anggaran . Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (*strenght/* kekuatan), *weaknes/* kelemahan, *opportunity/* peluang, *treath/* ancaman) dan pendekatan akuntabilitas instansi pemerintah yang akan diberlakukan pada waktu mendatang. Melalui pendekatan tersebut dapat diketahui, digambarkan dan dianalisis pemberdayaan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain membina usaha kecil/ koperasi.

Selanjutnya kemampuan atau potensi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam membina usaha kecil/koperasi sebagaimana tabel berikut:



**TABEL 2.1.: TINGKAT KEMAMPUAN DINAS KOPERASI PKM DALAM MEMBINAUSAHA KECIL/ KOPERASI**

NO	UNSUR YANG DITINJAU	TINGKAT KEMAMPUAN	
		TINGGI	RENDAH
1	SDM aparatur	memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman kerja	tidak memiliki
2	Sarana prasarana	memiliki bahan peralatan yang memadai	tidak memiliki / kurang
3.	Program kerja	memiliki program kerja yang sistematis	program kerja yang tidak sistematis
4	Anggaran	memiliki anggaran yang besar / cukup	anggaran kecil / tidak cukup

Sumber : *Modifikasi Sarwoto 1979 : 46*

Diantara 4 (empat) unsur tersebut, unsur sumber daya manusia aparatur sangat penting dan menentukan keberhasilan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian tujuannya.

Untuk meneliti kemampuan dan kematangan dalam pekerjaan sumber daya manusia aparatur, terdapat tiga tinjauan yaitu : 1. pengalaman pekerjaan, 2. pengetahuan pekerjaan, 3. pemahaman akan syarat-syarat pekerjaan, (Paul Hersey, Ken Blanchard: 1995: 189).

Selanjutnya format tentang tingkat kemampuan dan kematangan sumber daya manusia aparatur sesuai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.2. : TINGKAT KEMAMPUAN/KEMATANGAN  
SDM APARATUR**

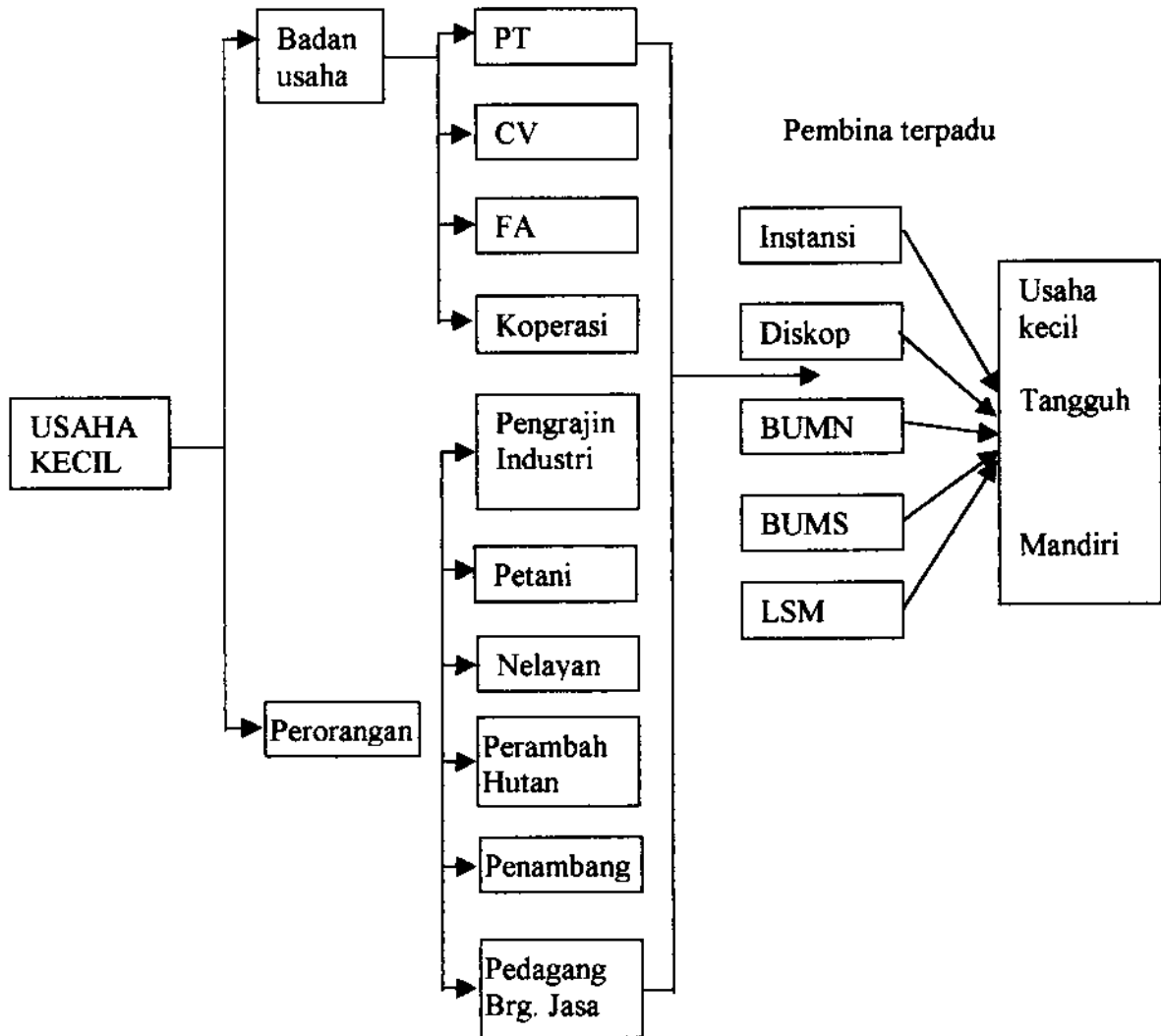
NO	UNSUR YANG DITINJAU	TINGKAT KEMAMPUAN	
		TINGGI	RENDAH
1	Pengalaman pekerjaan	memiliki pengalaman, pekerjaan	tidak memiliki
2	Pengetahuan pekerjaan	memiliki pengetahuan pekerjaan yang diperlukan	tidak memiliki
3.	Pemahaman akan syarat pekerjaan	sangat paham tentang hal-hal yang perlu dilakukan	kurang paham

*Diolah dari Paul Hersey dan Ken Blanchard 1995:189*

## 2.5. Pedoman Pelaksanaan Pembinaan

Pedoman pelaksanaan pembinaan usaha kecil/koperasi yang ada saat ini adalah dari Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah sebagai berikut: 1. kebijakan dasar , a. meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta pengusaha kecil melalui mutu peningkatan sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang ekonomi rakyat, b. menciptakan iklim usaha yang sehat 2. program pembinaan usaha kecil , a. meningkatkan akses pasar dan memperluas pangsa pasar, b. meningkatkan akses terhadap modal dan memperkuat struktur modal, c. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, d. meningkatkan akses dan penguasaan teknologi, e.meningkatkan kemitraan yang mantap.

Pembinaan usaha kecil/koperasi adalah sebagai gambar berikut :



**GAMBAR 2.1. : PEMBINAAN USAHA KECIL/ KOPERASI**

*Sumber : Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Mmenengah 1996.*

Dari gambar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Usaha kecil yang berbentuk badan usaha adalah : PT, CV, FA, Koperasi.

Usaha kecil perseorangan adalah : pengrajin industri, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang/jasa.

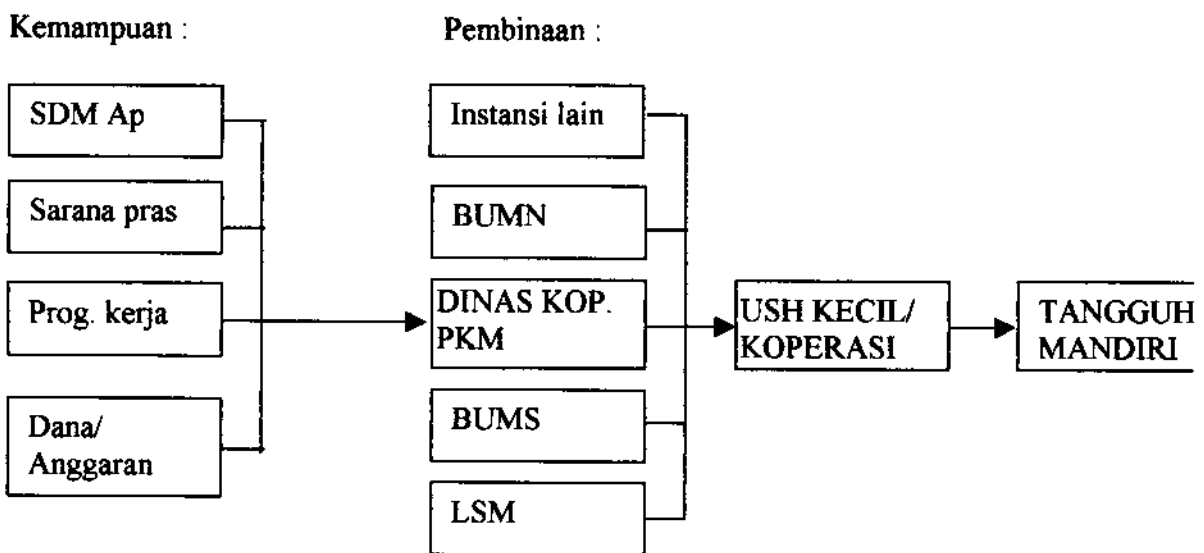
- b. Pembinaan usaha kecil dilaksanakan secara terpadu oleh : instansi pemerintah, dinas koperasi pengusaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan lembaga swadaya masyarakat .
- c. Tujuan pembinaan usaha kecil/koperasi adalah menjadikan usaha kecil yang tangguh, mandiri.

### BAB 3

## KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan kajian teoritis pada tinjauan pustaka yang telah diuraikan di muka berikut ini dikemukakan suatu kerangka koseptual yang dapat berfungsi sebagai penuntun sekaligus mencerminkan alur pemikiran dalam penelitian ini.

Kerangka konseptual dimaksud dapat dilihat dalam gambar 3. 1. sebagai berikut :



**GAMBAR 3.1. : KERANGKA KONSEPTUAL**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai dinas daerah baru yang dibentuk dalam rangka otonomi daerah dilengkapi dengan potensi/kemampuan sumber daya manusia aparatur, sarana dan prasarana, program kerja dana anggaran. Pengelolaan kemampuan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya lainnya. adalah guna pencapaian tujuan organisasi atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain dalam membina usaha kecil/ koperasi menjadi tangguh dan mandiri sehingga menjadi pilar ekonomi



kerakyatan. Dengan kata lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperlukan pengelolaan yang baik terhadap potensi kemampuan yang ada sehingga dapat tercapai tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah : sumber daya manusia aparatur meliputi kuantitas (jumlah), kualitas (golongan kepangkatan, pendidikan sekolah/pendidikan teknis, pengalaman kerja). Faktor sarana-prasarana kecukupannya, program kerja yang dapat dilaksanakan dan dana anggaran yang memadai. Untuk pemberdayaan secara berdaya guna berhasil guna potensi yang ada perlu diperhatikan faktor kekuatan , peluang , dan ancaman . Sedangkan dalam rangka pencapaian pelaksanaan program yang baik perlu diperhatikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang akan diberlakukan pada masa mendatang.

Sementara itu usaha kecil/koperasi merupakan potensi yang besar, tersebar di semua wilayah kecamatan dan desa, selama ini kurang mendapatkan pembinaan dari pemerintah tetapi mampu memiliki daya tahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia semenjak 1997 sampai sekarang. Disisi lain usaha kecil/koperasi memiliki kelemahan, sumber daya manusia kualitasnya rendah, mengalami ketiadaan modal, kelemahan dalam manajemen, usaha, pemasaran, peralatan bahan baku dan sebagainya. Dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa pembinaan usaha kecil/koperasi dapat berjalan baik apabila mendapatkan dukungan positif dari pemerintah dan DPRD berupa peningkatan potensi kemampuan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil Menengah, dukungan dari Pemerintah Tingkat I/ Pemerintah Pusat, BUMN/ BUMS/ masyarakat dan peran serta pengusaha kecil menengah sendiri.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat keberhasilan usaha kecil/ koperasi adalah kekuatan ekonomi regional diberlakukan AFTA 2003, kekuatan ekonomi internasional perdagangan bebas tetapi dalam penelitian ini faktor tersebut tidak dilakukan penelitian dan pembahasan.

## BAB 4

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan kemampuan atau potensi Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah meliputi : sumber daya manusia aparat, sarana prasarana, program kerja, dana/ anggaran dalam membina usaha kecil/ koperasi di Kabupaten Mojokerto.

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki ciri-ciri kualitas menunjuk pada segi “alamiah “ yang dipertentangkan dengan “kuantum atau jumlah pada penelitian kuantitatif. Atas dasar itulah penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan-perhitungan (Moleong:2000:2).Selanjutnya penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong 2000:3).

Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai upaya memberikan uraian yang deskriptif dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dengan kata lain dapat disebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Fokus penelitian dipusatkan pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang adekuat/cukup memadai (Hadari Nawawi 1993 : 63).

#### **4.2. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah :

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pembentukan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, berikut sumber daya yang disiapkan.
2. Kemampuan atau potensi sumber daya pada Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, yang diteliti adalah : a. sumber daya manusia aparatur, b. sarana prasarana , c. program kerja, d. anggaran keuangan .
3. Pembinaan usaha kecil/ koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.
4. Kendala-kendala dalam pembinaan usaha kecil/koperasi beserta alternatif pemecahannya.

#### **4.3. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto.

Situs penelitian adalah tempat dimana dapat ditangkap keadaan yang sebenarnya dari proyek yang diteliti. Adapun situs penelitian ini adalah di ruang kerja Kepala Dinas/ Wakil Kepala Dinas, ruang Kepala Bagian Tata Usaha, ruang Kasubdin Bina Usaha Koperasi, ruang Kasubdin Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, ruang Kasubdin Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, ruang Kasubdin Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia.

#### **4.4. Teknik dan Sumber Data Penelitian**

Istilah tehnik penelitian adalah ,cara atau metoda.yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

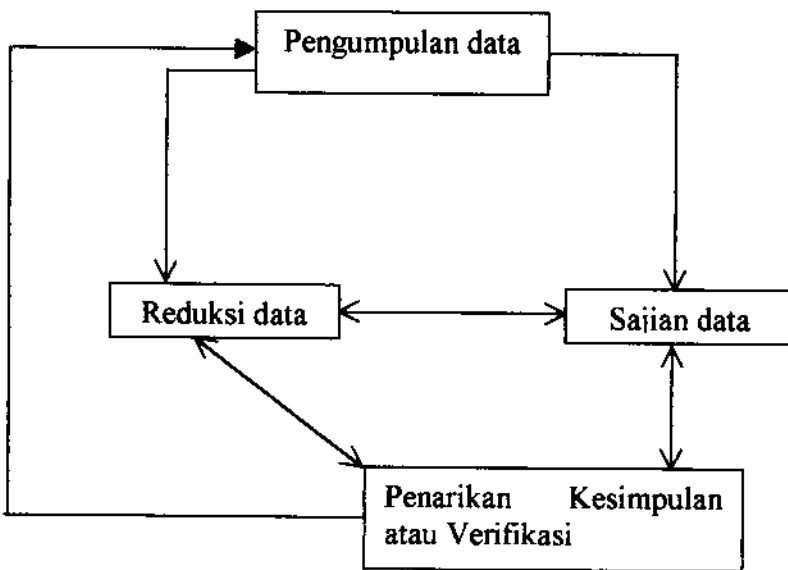
1. Teknik Observasi dilakukan melalui pengamatan, pencatatan dan berperan serta aktif.
2. Teknik kuesioner, yaitu mengumpulkan informasi menggunakan daftar pertanyaan tertulis.Pertanyaan tertulis terbuka untuk mendapatkan jawaban bebas dengan bahasa responden sendiri.Pertanyaan tertulis tertutup untuk mendapatkan jawaban yang telah disediakan kepada responden .
3. Teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi dengan mengadakan pertanyaan secara lisan kepada responden dan mendapatkan jawaban secara lisan.
4. Teknik dokumentasi pengumpulan data dari bahan bahan tertulis seperti arsip,buku buku, pedoman peraturan per undang undangan yang relevan dengan penelitian.(Hadari Nawawi 1993 : 5 )

Istilah sumber data penelitian adalah subyek dimana data atau informasi diperoleh (Suharsimi Arikunto : 1996 : 114 ). Adapun sumber data penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Mojokerto
2. Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto
3. Koperasi dan Pengusaha Kecil Kabupaten Mojokerto

#### 4.5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan model interaktif sebagai berikut :



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**GAMBAR 3.1. : ANALISIS MODEL INTERAKTIF**

*Sumber : Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992 : hal 20*

Sesuai gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Reduksi data

Dalam proses ini data yang dihimpun dipilah-pilah dan disederhanakan, sedangkan data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam menampilkan, menyajikan dan menarik kesimpulan sementara.

### 2. Penyajian data

Data-data yang telah dipilah dan disisihkan menurut kelompok data disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan dengan permasalahan yang dihadapi termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data direduksi.

### 3. Menarik kesimpulan

Merupakan proses untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi.

## 4.6. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan data dalam penelitian ini mengacu pada Lexy J. Moleong menggunakan kriteria :

1. Kredibilitas konsep ini menggantikan validitas internal pada penelitian kuantitatif. Untuk mendapatkan derajat kepercayaan dengan cara :

#### a. Memperpanjang waktu observasi

Untuk memberi kesempatan mengedit data dan mengecek ulang dengan cara meningkatkan pengamatan .

#### b. Mengadakan pengulangan pengamatan pada obyek yang diteliti

c. Membicarakan dengan orang lain khususnya dengan pembimbing

d. Trianggulasi

Mengecek kebenaran data, membandingkan data yang diperoleh dari responden dengan data dokumen dan dengan orang yang dianggap memahami informasi guna memastikan kebenaran data.

e. Mengadakan cek ulang

Mengecek ulang secara garis besar hasil wawancara dengan para responden apakah sudah sesuai dengan data yang dibutuhkan, apabila terjadi kekurangan langsung menemui responden kembali, termasuk mencocokkan kembali dengan data dokumen.

2. Keteralihan, dilakukan uji ulang dan membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu

3. Kepastian hasil penelitian

Untuk mendapatkan kepastian hasil penelitian dilakukan diskusi dengan pembimbing.



## BAB 5

### HASIL PENELITIAN

#### 5.1. Gambaran Umum

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto serta pada usaha kecil/ koperasi di Kabupaten Mojokerto. Dinas Koperasi Pengusaha kecil dan Menengah semula adalah instansi vertikal, keberadaannya diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah nomor 710/ KEP/ M/ XII/ 1997. Setelah menjadi dinas daerah sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001, lebih lanjut diatur dalam surat keputusan Bupati Mojokerto nomor 21 tahun 2001 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Koperasi Pengusaha kecil dan Menengah. Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto memiliki personil 39 orang karyawan, terdiri dari 22 pejabat struktural dan 17 orang staf. Jumlah usaha kecil 658 sedangkan jumlah koperasi ada 318 koperasi. Penelitian ini merupakan penelitian populasi jumlah sampel yang diteliti untuk sumber daya manusia aparatur adalah sama dengan populasi yaitu sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) orang aparatur Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah. Disamping itu penelitian pada usaha kecil/ koperasi adalah merupakan penelitian sampel, yaitu dengan cara pengambilan sampel wilayah pada 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan karena jumlah sampel yang akan diteliti sangat besar, diambil secara random  $\pm 10\% - 15\%$  usaha kecil/koperasi yang ada pada setiap kecamatan.

## **5.2. Kemampuan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah**

### **5.2.1. Struktur Organisasi**

Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto sebagai Dinas daerah peresmiannya pada tanggal 19 April 2001, adapun tugas pokok dan fungsinya meliputi :

#### **a. Tugas pokok**

Membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang koperasi pengusaha kecil dan menengah.

#### **b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan penyusunan rencana program
- Melaksanakan pembinaan
- Melaksanakan penyusunan pedoman teknis
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian
- Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia koperasi pengusaha kecil dan menengah
- Melaksanakan tugas-tugas ketatalaksanaan
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala daerah

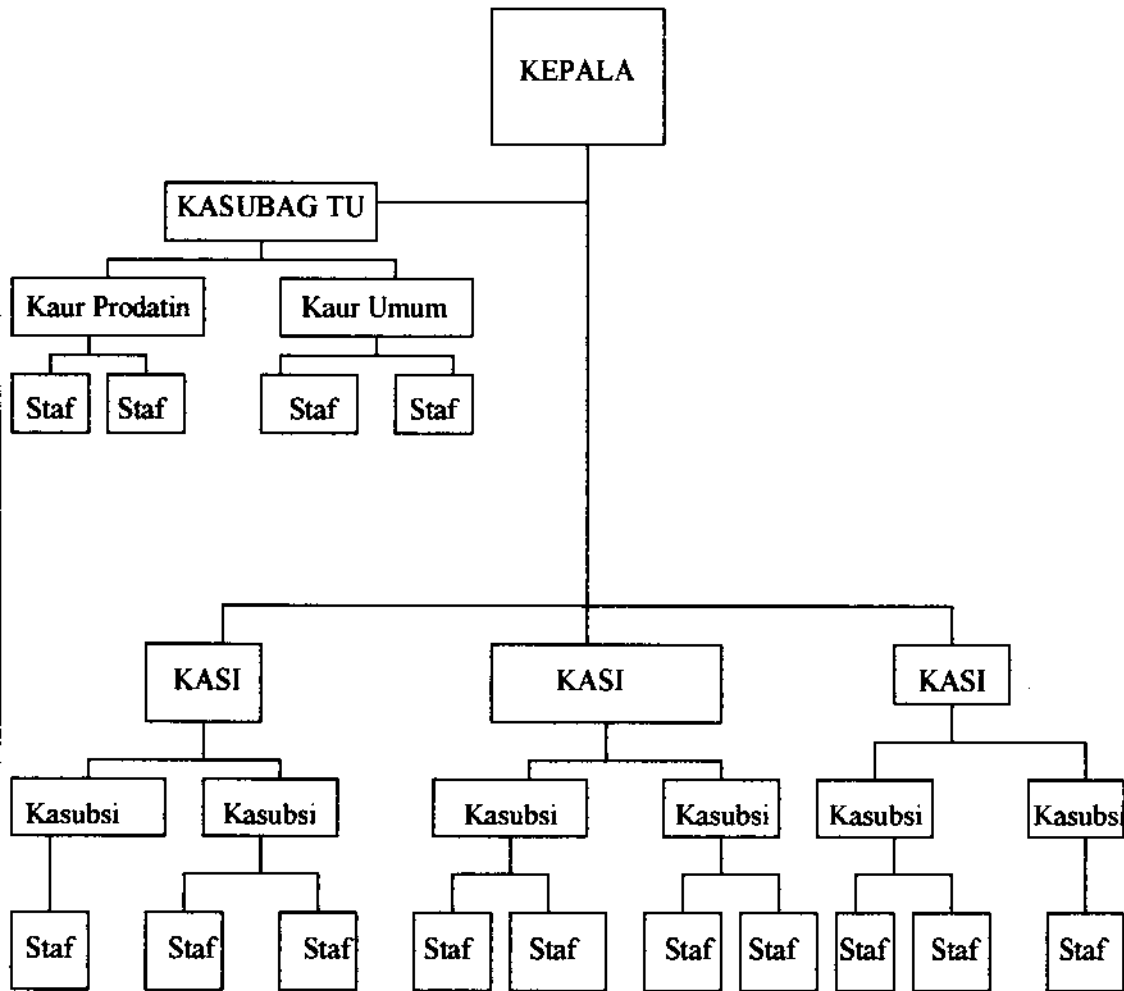
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai dinas daerah Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha meliputi :
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
4. Sub Dinas Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari seksi-seksi :
  - Seksi Organisasi dan Tata Laksana
  - Seksi Hukum, Pelaksanaan Perundang-undangan
  - Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Sub dinas Bina Usaha Koperasi, terdiri dari Seksi-seksi :
  - Seksi Tanaman pangan, Perkebunan dan Kehutanan
  - Seksi Peternakan dan Perikanan
  - Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan
6. Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Pengawasan Simpan Pinjam, terdiri dari seksi-seksi sebagai berikut :
  - Seksi Bina Usaha Simpan Pinjam
  - Pembiayaan dan Jasa Keuangan
  - Seksi Simpan Pinjam
7. Sub Dinas Bina Usaha Pengusaha Kecil dan Menengah, terdiri dari seksi-seksi :
  - Seksi Industri dan Pertanian
  - Seksi Industri non Pertanian

- **Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha**

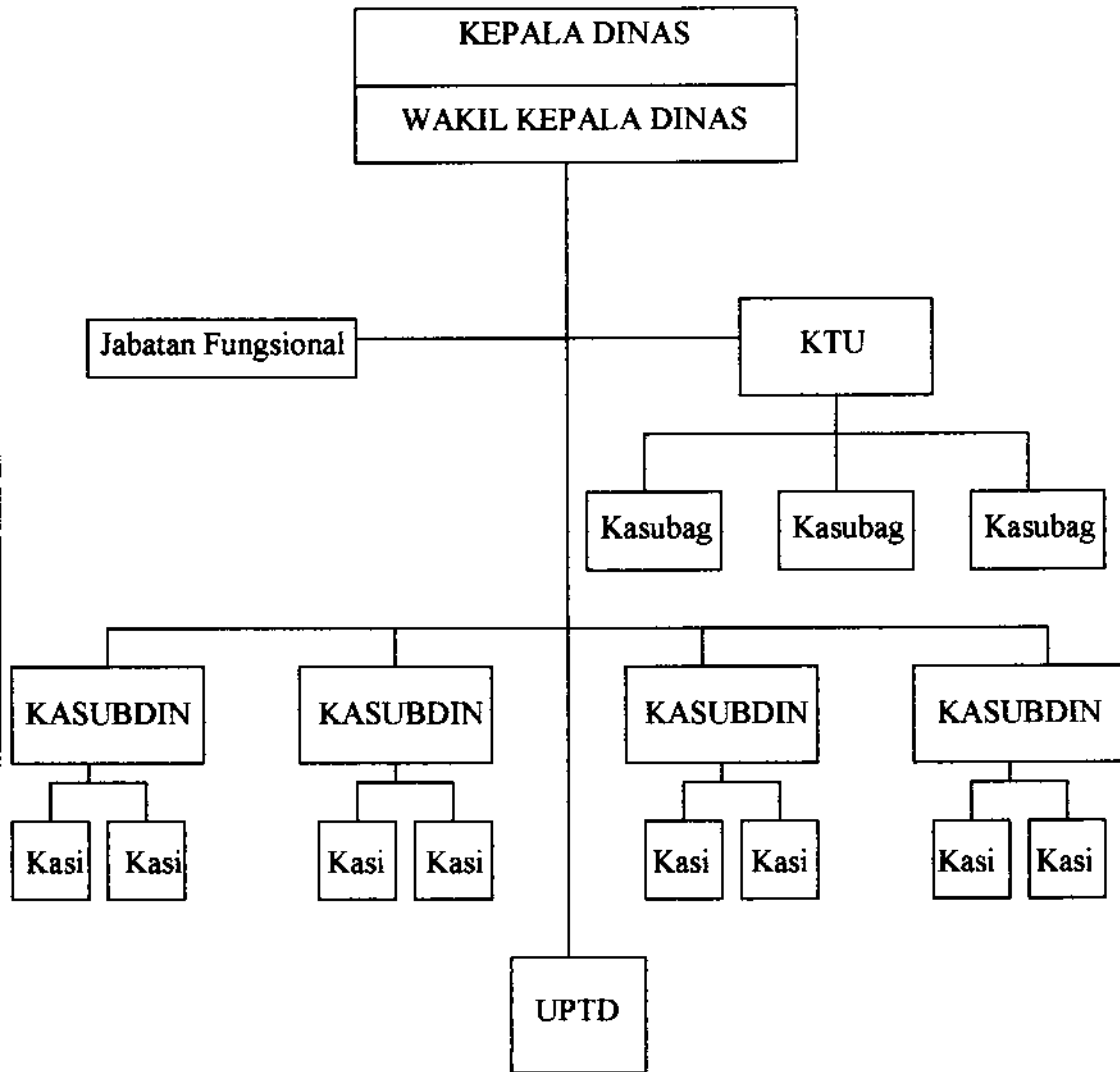
Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah pada saat masih instansi vertikal dan setelah menjadi dinas daerah :

**GAMBAR 5. 1 : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI PK  
KABUPATEN MOJOKERTO  
(Sesuai Kepmen Kop & PPK No.701/ KEP/ M/ XII/ 1997)**



*Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto*

**GAMBAR 5.2 : STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN MOJOKERTO  
(Sesuai SK Bupati No. 21 Tahun 2001)**



*Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah*

Perbedaan antara struktur organisasi Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil (SK. Menteri Koperasi, PPK No. 701/ KEP/ M/ XII/ 1997 (dengan struktur Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (SK. Bupati Mojokerto nomor : 21 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

**TABEL 5.1 : PERBEDAAN ANTARA STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI PENGUSAHA KECIL DENGAN DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH**

NO.	TINJAUAN ASPEK	KANTOR DEPARTEMEN KOPERASI PENGUSAHA KECIL	DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
1.	Dasar	SK. Menteri Koperasi PPK	SK. Bupati Mojokerto
2.	Status	Instansi vertikal	dinas daerah otonom
3.	Eselon	III B	II B
4.	Pimpinan	Kepala Kantor	Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
5.	Kelengkapan organisasi	a. Kasubag TU b. Kepala Seksi 2 (dua) c. Kepala Urusan 2 (dua) d. Kepala Seksi 6 (enam) e. Lain - lain : -	a. Kepala Tata Usaha b. Kepala Sub Dinas 4 (empat) c. Kepala Sub bag 3 (tiga) d. Kepala Seksi 9 (sembilan) e. Lain - lain : - Terdapat jabatan fungsional - Terdapat UPTD

*Sumber : diolah dari data Dinas Koperasi PKM : 2001*

### 5.2.2. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah memiliki sumber daya manusia aparatur sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang terdiri dari golongan IV, 7 (tujuh) orang, golongan III, 27 (dua puluh tujuh) orang, golongan II, 5 (lima) orang, sebagaimana daftar tabel berikut :

**TABEL 5. 2 : DATA SDM APARATUR DINAS KOPERASI PKM BERDASARKAN GOLONGAN KEPANGKATAN**

No.	Golongan	Jumlah			Keterangan (%)
		L	P	Jumlah	
1.	IV (Empat)	6	1	7	18
2.	III (tiga)	21	6	27	69, 2
3.	II (dua)	2	3	5	12, 8
4.	I (satu)	-	-	-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

*Sumber data : Seksi kepegawaian Dinas Koperasi PKM : 2001*

Ditinjau dari latar belakang pendidikan formal data sumber daya aparatur

Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

**TABEL 5. 3 : DATA SDM APARATUR DINAS KOPERASI PKM BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

No.	Golongan	Jumlah			Keterangan (%)
		L	P	Jumlah	
1.	S - 2	4	-	4	10, 26
2.	S - 1	8	5	13	33, 33
3.	Sarjana Muda	3	1	4	10, 26
4.	SLTA	15	3	18	46, 15
5.	SLTP	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

*Sumber data : Seksi kepegawaian Dinas Koperasi PKM : 2001*

Ditinjau dari latar belakang pendidikan penjenjangan dan persyaratan bagi jabatan struktural. Pendidikan penjenjangan yang telah diikuti oleh aparatur Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah adalah sebagai tabel berikut :



**TABEL 5. 4 : DATA FORMASI JABATAN DAN PERSYARATAN PENDIDIKAN PENJENJANGAN**

No.	Golongan	Pendidikan penjenjangan	jumlah		Keterangan
			Jabatan	Memenuhi persyaratan	
1.	Eselon II	SPAMEN	1	-	0
2.	Eselon III	DIKLAPIM III	6	6	100
3.	Eselon IV	DIKLATPIM IV	15	6	40
		<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

*Sumber data : Seksi kepegawaian Dinas Koperasi PKM : 2001*

Ditinjau dari masa kerja aparatur dapat diuraikan pada tabel berikut :

**TABEL 5. 5 : DATA SDM APARATUR DINAS KOPERASI PKM DITINJAU DARI MASA KERJA**

No.	Masa Kerja	L	P	Jumlah	Keterangan
1.	1 – 9 tahun	3	3	6	15, 38
2.	10 – 19 tahun	21	6	27	69, 24
3.	20 – 29 tahun	5	1	6	15, 38
4.	30 – 49 tahun	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

*Sumber data : Seksi kepegawaian Dinas Koperasi PKM : 2001*

Ditinjau dari pendidikan teknis fungsional aparatur yang telah mengikuti pada tahun 2001 sejumlah 11 (sebelas) orang sebagaimana daftar tabel berikut :

**TABEL 5. 6 : DATA SDM APARATUR DINAS KOPERASI PKM YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL TAHUN 2001**

No.	Golongan	L	P	Jumlah	Keterangan
1.	Bendahara proyek	2	-	2	18, 2
2.	Pimpro	2	-	2	18, 2
3.	TOT perkoperasian	3	-	3	27, 25
4.	Perkoperasian	2	2	4	36, 35
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

*Sumber data : Seksi kepegawaian Dinas Koperasi PKM : 2001*

Data pendidikan teknis perkoperasian aparatur Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : dari 39 orang aparat sejumlah 26 orang telah mengikuti pendidikan teknis perkoperasian sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 5. 7 : DATA PENDIDIKAN TEKNIS  
APARATUR DINAS KOPERASI PKM**

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	Pendidikan Teknis		Keterangan
			Sudah	Belum	
1.	Pejabat struktural	22	16	6	1. Jenis pendidikan 2. Pembina koperasi/ KUD 3. Manajemen 4. Akuntansi 5. Simpan pinjam 6. Lain-lain
2.	Staf	17	10	7	
	<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	

*Sumber data : Seksi kepegawaian Dinas Koperasi PKM : 2001*

Dari data tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pejabat struktural yang telah mendapatkan pendidikan teknis perkoperasian  $\pm 72,7\%$  atau baik
2. Staf yang telah mendapatkan pendidikan teknis perkoperasian  $\pm 51\%$  atau masih kurang

Dari data – data dimuka lebih lanjut dapat diketahui peningkatan/ penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pada Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 5. 8 : KEADAAN SDM DINAS KOPERASI PKM  
TAHUN 2000 DAN 2001**

No.	Uraian	Tahun 2000	Tahun 2001	Keterangan
1.	Kuantitas	13	22	- Peningkatan pada unsur pimpinan
	- Unsur pimpinan	17	17	
	- Staf			
2.	Kualitas			
	a. Golongan	1	7	- Peningkatan pada gol IV dan gol III
	- IV	23	27	
	- III	6	5	
	- II			
	b. Pendidikan			
	- S - 2	1	4	- Peningkatan Pendidikan S2, S1, SMTA
	- S - 1	6	13	
	- Sarmud	4	4	- Sarjana Muda tetap
	- SLTA	19	18	
	c. Eselon			
	- II	-	1	- Kenaikan eselon
	- III	1	6	- Kenaikan pada eselon II, III, IV
	- IV	6	15	
	- V	6	-	- Penghapusan eselon V
	d. Masa kerja			
	- - 9 Tahun	6	6	
	- 10 - 19 Tahun	22	27	
	- 20 - 29 Tahun	2	6	
	- 30 - 49 Tahun	-	-	
	e. Pend teknis Kop			
	- Pimpinan	9	20	
	- Staf	4	6	

Sumber data : Dinas Koperasi PKM : 2001

### 5.2.3. Sarana dan Prasarana

Dari hasil penelitian diketahui 29 (dua puluh sembilan) macam sarana prasarana yang ada sejumlah 12 (dua belas) macam masih dalam keadaan baik 34, 5 % dan sejumlah 17 (tujuh belas) macam lainnya rusak 58, 6 % sesuai dengan tabel berikut :

**TABEL 5.9 : SARANA PRASARANA/ INVENTARIS  
DINAS KOPERASI PKM**

No.	Nama/ Jenis Barang	Merk	Tahun Pembelian	Jumlah	Keadaan	
					Baik	Rusak
1	Tanah/ rumdin	-	1987	200 m <sup>2</sup>	baik	-
2	Rumah Dinas	-	1987	1190 m <sup>2</sup>	baik	-
3	Tanah Kantor	-	1987	70 m <sup>2</sup>	baik	-
4	Gedung Kantor	-	1987	300 m <sup>2</sup>	baik	-
5	Sepeda Motor	Honda/ Suzuki	1990/ 1991	16	baik	-
6	Mesin Ketik	Remington	1991	5	3	2
7	Mesin Hitung	Casio	1987	3	-	3
8	Mesin Stensil	Geset/ Hotil	1987	2	-	2
9	Almari	-	1996	3	3	-
10	Rak Besi/Kayu	-	1982	10	8	2
11	Filling Cabinet	-	-	2	1	1
12	Brangkas	-	-	2	2	-
13	Papan Nama	-	-	17	17	-
14	OHP	Cabin	1980	2	-	2
15	Meja Kerja kayu	-	1988	47	47	-
16	Kursi Besi/ kayu	-	1988	44	41	3
17	Jam Elektronik	-	-	6	6	-
18	Kipas Angin	Nasional	-	10	6	4
19	Tape rec/karaoke	Tens	1993	2	-	2
20	Microphon	-	-	1	-	1
21	Tangga Almn	-	-	1	1	-
22	Slide Projector	-	-	1	-	1
23	Telex	Panasonic	1996	1	-	1
24	Intercom	Commax	1982	6	-	6
25	Kalkulator	-	-	16	2	14
26	Exhouse Fan	Nasional	-	1	1	-
27	Pesawat Telepon	-	1970	1	1	-
28	PC Unit	Intel/ Pentium	1997/1999	2	1	1
29	Mobil	Kijang/ Daihatsu	2001	2	2	-

*Sumber data : Bendaharawan Barang Dinas Koperasi PK M : 2001*

#### 5.2.4. Program Kerja

a. program kerja Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah tahun 2001

ditetapkan tanggal 1 juli 2001 meliputi :

1. Program kerja bagian Tata Usaha :

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan
2. Program kerja Sub Dinas Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
- Seksi Organisasi dan Tata laksana
  - Seksi hukum, Pelaksanaan Perundang-undangan
  - Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Program kerja Sub dinas Bina Usaha Koperasi :
- Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
  - Seksi Peternakan dan Perikanan
  - Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan
4. Program kerja Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Pengawasan Simpan Pinjam :
- Seksi Bina Usaha Simpan Pinjam
  - Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan
  - Seksi Pengendalian Simpan Pinjam
5. Program kerja Sub Dinas Bina Usaha Pengusaha Kecil dan Menengah
- Seksi Industri dan pertanian
  - Seksi Industri non Pertanian
  - Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha

Program kerja Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2001 sifatnya merupakan program transisi/ peralihan karena perubahan dari Kantor Koperasi instansi vertikal menjadi dinas daerah. Program tersebut untuk waktu 6 (enam) bulan mulai Juli sampai dengan Desember 2001 sebagaimana tabel terlampir dibelakang :

b. Perencanaan srategik tahun 2001 – 2005, ditetapkan 1 Oktober 2001 memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Visi Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah :

“Memberdayakan gerakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan”

2. Misi Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah:

“Memberdayakan koperasi menjadi pelaku ekonomi yang tangguh mandiri dan profesional. Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri dan profesional”.

3. Kebijakan program kegiatan meliputi : kebijakan organisasi, program operasional organisasi, kegiatan organisasi.

4. Rencana kegiatan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah kurun waktu 1-5 tahun ke depan meliputi :

- a. Peningkatan pemahaman kelembagaan koperasi
- b. Penyempurnaan penataan kelembagaan koperasi
- c. Pembinaan simpan pinjam, pelatihan kredit simpan pinjam/ usaha simpan pinjam
- d. Penetapan manajemen simpan pinjam sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam
- e. Pengembangan usaha ekonomi rakyat
- f. Pemberdayaan koperasi dalam rangka pengadaan pangan
- g. Pembinaan pelatihan pengelolaan koperasi

- h. Pengamanan terhadap kredit program/ non program koperasi
  - i. Meningkatkan koperasi dalam rangka mengelola, memproses, memasarkan dan mengembangkan usaha pangan
  - j. Meningkatkan koperasi dalam menangani organisasi, management dan administrasi serta kegiatan usahanya
  - k. Meningkatkan kemampuan pengurus dan pengawas koperasi dalam rangka membuat laporan keuangan
  - l. Penilaian kesehatan dan penetapan hasil penilaian kredit simpan pinjam/ usaha simpan pinjam
  - m. Mengembangkan sistem pelayanan informasi pasar dan dunia usaha untuk dapat dimanfaatkan secara optimal oleh koperasi
  - n. Identifikasi pengusaha kecil menengah dan penciptaan jaringan usaha kecil/ peningkatan produktivitas pengusaha kecil dan menengah
5. Daftar perencanaan strategik 1 tahun 2001 adalah sebagai tabel lampiran dibelakang.

c. Program pembinaan usaha kecil koperasi melalui APBD II dan APBN:

1. Program peningkatan produktivitas pengusaha kecil menengah, dana APBD II dengan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk :

- Peningkatan kemampuan usaha kelompok produktif menjadi lembaga pra koperasi pada 4 (empat) desa di wilayah Kecamatan Pungging, Kutorejo, Trowulan dan Gondang.
- Bantuan peralatan profil pigura Desa Sanggrahan Kecamatan Kutorejo.
- Bantuan peralatan pengrajin gypsum fiberglass Desa Pakis Kecamatan Trowulan.
- Bantuan pelatihan pengrajin bordir Desa Pungging Kecamatan Pungging.
- Pelatihan manajemen usaha kelompok produktif Desa Pungging, Sanggrahan dan Desa Pakis.

2. Program identifikasi pengusaha kecil menengah dan penciptaan jaringan usaha dari APBD II dengan biaya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk :

- Identifikasi usaha kecil baru Desa Kemasan Tani dan Desa Pungging.
- Identifikasi PKM potensi unggulan 5 desa : Sooko, Banjar Agung, Japan, Karang Kedawang, Modopuro.
- Identifikasi PKM peluang produk ekspor Desa Bejjong, Sooko, Pesanggrahan.



- Bantuan peralatan teknis pengrajin tas, dompet Desa Mayangrejo Kecamatan Jetis.
  - Pembentukan kelompok sejenis produktif menjadi lembaga pra koperasi : pigura Desa Purworejo, fiberglass Desa Pakis, tas dan dompet Desa Mojorejo, samiler Desa Gondang.
  - Temu pengembangan kemitraan kerjasama pengusaha kecil menengah, pengrajin bordir, tas dan dompet.
  - Bimbingan teknis permodalan untuk pengrajin bordir, pigura, fiber, tas, dompet.
  - Pengembangan akses permodalan dengan BUMN, PT Angkasa Pura, Bank Jatim, dengan pengrajin bordir, pigura, fiber, tas/ dompet.
  - Pameran/ promosi.
  - Pelatihan teknis manajemen usaha tas, dompet Desa Mojorejo Kecamatan Jetis.
3. Program pemberdayaan koperasi dana APBD II sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk :
- a. Pengembangan ekonomi rakyat, meliputi :
    - Koordinasi penyusunan program.
    - Sosialisasi koperasi pemberdayaan koperasi pangan.
    - Inventarisasi kredit program dan non program.
    - Bimbingan proposal kepada koperasi terkait dengan perbankan.
    - temu usaha pengembangan usaha.

- temu kemitraan BUMN/BUMS dengan koperasi.
  - b. Pengembangan kelembagaan
    - Penyusunan profil koperasi.
    - Bimbingan administrasi penilaian koperasi berprestasi.
    - Bimbingan RAT.
    - Monitoring dan evaluasi.
  - c. Pengembangan koperasi dan pengusaha kecil.
    - Koordinasi perumusan kebijaksanaan pembinaan usaha kecil/koperasi.
    - Pengembangan jaringan usaha koperasi.
4. Program peningkatan iklim pendukung usaha pengusahaan kecil menengah dan koperasi dari APBN sebesar Rp.45.628.000,- (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk :
- a. Penguatan lembaga keuangan masyarakat.
    - Perkuatan pembiayaan kredit simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pada 11 koperasi.
    - Penataan administrasi organisasi dan keuangan 25 koperasi.
    - Temu usaha kemitraan dan semiloka pengembangan lembaga keuangan mikro.
  - b. Monitoring dan evaluasi pengeluaran kredit.
  - c. Pengembangan dan perkuatan jaringan dan kemitraan.
  - d. Pengembangan kelembagaan :
    - Monitoring evaluasi pelaksanaan persaingan sehat 70 buah koperasi.

- Pembinaan advokasi 60 buah koperasi.
  - Monitoring dan evaluasi 81 buah koperasi.
  - Pemantapan sistem pengawasan 75 buah koperasi.
  - Penilaian kesehatan 75 buah koperasi.
- e. Pengembangan koperasi/ usaha kecil.
- Pemutakiran data 275 koperasi.
  - Program direktori 20 PKM.
5. Program peningkatan produktivitas usaha PKMK dari dana APBN sebesar Rp. 45.351.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk :
- Temu konsultasi usaha baru unggulan 50 PKM.
  - Identifikasi usaha baru 25 PKM.
  - Temu konsultasi usaha kelompok tani dengan KUD.
  - Magang pengurus 8 koperasi.
  - Pembinaan sarana/ prasarana pangan 19 KUD.
  - Pembinaan pengembangan produk usaha simpan pinjam 35 koperasi.
  - Pemantauan/ evaluasi usaha simpan pinjam 35 koperasi.
  - Temu konsultasi pengembangan dan pemantapan peralatan pra/ pasca panen 25 KUD pelaksana program pangan.
  - Pameran/ promosi.
  - Pengembangan kemitrausahaan 50 PKM.

### 5.2.5. Anggaran

#### a. Anggaran rutin

Sesuai dengan surat keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 61 tahun 2001, tanggal 1 Agustus 2001 tentang pengesahan daftar isian kegiatan daerah tahun anggaran 2001 disebutkan bahwa anggaran rutin Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- Belanja pegawai	:	Rp. 538.315.000,-
- Belanja non pegawai	:	
Belanja barang	:	Rp. 8.550.000,-
Belanja pemeliharaan	:	Rp. 5.850.000,-
Belanja perjalanan dinas	:	Rp. 3.000.000,-
Jumlah	:	Rp. 555.715.000,-

Rincian besarnya anggaran rutin non pegawai tahun anggaran 2000 dibandingkan dengan tahun anggaran 2001 adalah sebagai tabel berikut :

**TABEL 5.10. DAFTAR BELANJA NON PEGAWAI  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2000 DAN 2001**

NO	Uraian	Tahun Anggaran	
		2000	2001
I	<b>BELANJA BARANG</b>		
1.	Ongkos kantor	12.644.000,-	7.550.000,-
2.	Alat-alat kantor	5.815.000,-	2.000.000,-
3.	Barang cetakan dipakai habis	-	-
4.	Langganan listrik/telepon	4.500.000,-	4.800.000,-
5.	Lain-lain ongkos kantor	2.329.000,-	750.000,-
6.	Pembelian inventaris kantor	1.000.000,-	1.000.000,-
7.	Pembelian meubelair	-	-
8.	Lain-lain pembelian inv. kantor		1.000.000,-
II	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	1.000.000,-	
1.	Biaya pemeliharaan gdg dan kantor lain-lain pemel ged dan kantor	4.353.000,-	2.500.000,- 2.500.000,-
2.	Biaya pemeliharaan kendaraan lain-lain pemeliharaan kendaraan	4.353.000,- 2.405.000,-	2.600.000,- 2.600.000,-
3.	Biaya pemeliharaan inv. kantor lain-lain pemel inventaris kantor	2.405.000,- 1.350.000,-	750.000,- 750.000,-
III	<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>	1.350.000,-	
1.	Biaya perjalanan dinas dalam daerah	-	1.000.000,-
2.	Biaya perjalanan dinas luar daerah	-	2.000.000,-
	<b>TOTAL (I + II + III)</b>	<b>21.752.000,-</b>	<b>17.400.000,-</b>

*Sumber data : Kasi Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah : 2001*

b. Anggaran pembangunan

1. Proyek peningkatan produktivitas pengusaha kecil dan menengah, dari APBD II :

Sesuai surat keputusan Bupati nomor 188 – 45 / 890 / HK / 406-012 / 2001 tanggal 30 Agustus 2001, tentang Pengesahan proyek yang dibiayai APBD tahun anggaran 2001, ditetapkan proyek peningkatan produktivitas pengusaha kecil dan menengah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Proyek tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan pengusaha kecil dan menengah agar tumbuh menjadi pengusaha kecil dan menengah yang tangguh dan mandiri serta berkembang menjadi pengusaha besar, menumbuhkan semangat hidup, perilaku dan kemampuan kewirausahaan sumber daya manusia untuk mempercepat pencapaian pembangunan koperasi/pengusaha kecil dan menengah. Uraian peruntukan proyek antara lain sebagai berikut :

- a. Adinistrasi proyek Rp. 2.500.000,-
  - b. Peningkatan kemampuan usaha kelompok produktif menjadi lembaga pra koperasi : Desa Pungging Kecamatan Pungging, Desa Sanggrahan Kecamatan Kutorejo, Desa Pakis Kecamatan Trowulan, Desa Centong Kecamatan Gondang dengan biaya : Rp. 5.500.000,-
- Bantuan peralatan bagi pengrajin profil/ pigura Desa Sanggrahan Kecamatan Kutorejo, bantuan peralatan pengrajin gypsum fiberglass Desa Pakis Kecamatan Trowulan, bantuan peralatan pengrajin bordir Desa Pungging Kecamatan Pungging dengan biaya keseluruhan Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pelatihan ketrampilan manajemen usaha kelompok produktif: kelompok pengrajin bordir di Desa Pungging Kecamatan Pungging kelompok pengrajin pigura Desa Sanggrahan Kecamatan Kutorejo, kelompok pengrajin fiberglass Desa

Pakis Kecamatan Trowulan adapun jumlah biayanya sebesar  
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai berikut :

**TABEL 5.11. : PROYEK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS  
PENGUSAHA KECIL MENENGAH APBD TA 2001**

NO	PERUNTUKAN PROYEK	JUMLAH (000)	KETRERANGAN
1	Adiministrasi	2.500	
2	Peningkatan kemampuan usaha kelompok produktif menjadi pra koperasi :		
	- Peningkatan kemampuan usaha	5.500	- pada 4 desa
	- bantuan perlatan pengrajin gips, pigora, fiber, bordir	35.000	- pada 3 desa
	- pelatihan ketrampilan manajemen usaha	12.000	- pengrajin bordir, pigura, fiber
	<b>Jumlah</b>	<b>50.000</b>	

*Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah : 2001*

2. Proyek identifikasi pengusaha kecil menengah dan penciptaan jaringan usaha dari APBD II :

Sesuai surat keputusan Bupati nomor : 188.45/889/HK/406-012/2001 tanggal 30 Agustus 2001 tentang pengesahan proyek yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2001, ditentukan besarnya proyek identifikasi pengusaha kecil menengah dan penciptaan jaringan usaha sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Tujuan pembangunan proyek adalah untuk meningkatkan kemampuan di bidang kelembagaan, usaha maupun kemitraan yang mengacu pada kebijakan operasional pembinaan pengusaha kecil menengah yaitu meningkatkan akses pasar dan

memperbesar pangsa pasar, meningkatkan akses terhadap sumber modal. Peruntukan proyek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Adminstrasi proyek Rp. 3.750.000,-

b. Pengembangan ekonomi Rp. 7.200.000,-

Identifikasi pengusaha kecil menengah baru : Desa Kemasan Tani, Pungging, Modopuro

Identifikasi PKM peluang produk ekspor : Bejijong, Sooko, Pesanggrahan

c. Bantuan peralatan teknis pengrajin tas, dompet Desa Banjarjo Kecamatan Jetis Rp. 18.500.000,-

d. Penciptaan jaringan PKM Rp. 23.850.000,-

Pembentukan kelompok sejenis produktif menjadi lembaga pra koperasi : pengrajin pigura Desa Purworejo, Pungging, pengrajin fiberglass Desa Pakis Trowulan, pengrajin tas dan dompet Desa Margorejo Jetis, pengrajin samiler Desa Kemasan Tani Gondang. Temu pengembangan kemitraan kerjasama pengusaha kecil menengah dan pengusaha baru: pengrajin bordir, pengrajin tas dan dompet.

Bimbingan teknis permodalan pengrajin bordir, pigura, fiber, tas dan dompet.

Pengembangan akses permodalan pengusaha kecil menengah dengan BUMN PT Angkasa pura 1 Surabaya, Bank Jatim cabang Mojokerto.



e. Promosi dagang industri Rp. 10.000.000,-

f. Peningkatan sumber daya manusia Rp. 11.000.000,-

Pelatihan teknis manajemen usaha kecil Desa Mojorejo, pengusaha tas dan dompet kecamatan Jetis pelatihan teknis produksi dan pemasaran pengusaha tas dan dompet Desa Mojorejo Kecamatan Jetis.

g. Supervisi, monitoring dan evaluasi Rp. 1.200.000,-

Uraian selanjutnya sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 5.12. : PROYEK IDENTIFIKASI PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN PENCIPTAAN JARINGAN USAHA APBD II TA 2001**

No <sub>2</sub>	PERUNTUKAN PROYEK	JUMLAH (000)	KETERANGAN
1.	Administrasi	3.750	
2.	Pengembangan ekonomi - identifikasi PKM baru - identifikasi PKM unggulan - identifikasi PKM ekspor	7.200	
3.	Bantuan peralatan	18.500	
4.	Penciptaan jaringan usaha PKM - pembentukan kelompok sejenis menjadi pra koperasi - temu kemitraan - bintek permodalan	23.850	
5.	Promosi	10.000	
6.	Peningkatan SDM	11.000	
7.	Supervisi	1.100	
	<b>Jumlah</b>	<b>75.000</b>	

*Sumber data : Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah ;2001*

3. Proyek peningkatan iklim pendukung usaha pengusaha kecil menengah dan koperasi dari dana APBN :

Dari penelitian, rencana kegiatan operasional bagian proyek peningkatan iklim pendukung usaha pengusaha kecil menengah dan

koperasi Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2001 jumlah anggarannya sebesar Rp.45.688.000,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Administrasi proyek : Rp. 6.780.000,-

b. Pengembangan usaha ekonomi : Rp. 9.300.000,-

Perkuatan lembaga keuangan masyarakat.

Perkuatan pembiayaan kredit simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro : 11 UKM.

Penataan administrasi organisasi dan keuangan kredit simpan pinjam/usaha simpan pinjam : 25 koperasi.

Temu usaha kemitraan : 25 orang.

Semiloka pengembangan lembaga keuangan mikro : 25 orang.

Monitoring penyaluran kredit program/non program : 9 Koperasi.

Temu usaha dan temu konsultasi : 48 orang.

c. Pengembangan kelembagaan Rp. 19.677.000,-

Monitoring evaluasi persaingan sehat koperasi : 70 koperasi.

Pembinaan advokasi penegakan hukum koperasi : 60 buah koperasi.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perkoperasian : 81 koperasi.

Pemantapan sistem pengawasan : 75 koperasi penilaian kesehatan.

d. Pengembangan koperasi dan pengusaha kecil : Rp. 10.051.000,-

Pemutakiran data : 275 Koperasi

Penyusunan direktori PKM : 20 PKM

Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 5. 13. : PROYEK PENINGKATAN IKLIM PENDUKUNG USAHA PKMK DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2001**

NO.	PERUNTUKAN PROYEK	JUMLAH (000)	KETERANGAN
1.	Administrasi	6.780	
2.	Pengembangan usaha ekonomi	9.300	
	Perkuatan LKM		
	- Monitoring		
	- Pengembangan/ perkuatan kemitraan		
3.	Pengembangan kelembagaan	19.677	
	- Monitoring		
	- Advokasi		
	- Sistem pengawasan KSP/ USP		
	- Penilaian kesehatan KSP/ USP		
4.	Pengembangan koperasi/ usaha kecil	10.057	
	- Pemuthakiran data		
	- Penyusunan direktori PKM		
	<b>Jumlah</b>	<b>45.808</b>	

*Sumber data : Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah : 2001*

5. Proyek peningkatan produktivitas usaha dari dana APBN 2001.

Proyek peningkatan produktivitas pengusaha kecil menengah dan/ koperasi dana APBN tahun anggaran 2001 adalah sebesar Rp. 45.351.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah). Tujuan proyek tersebut adalah untuk mengembangkan usaha yang berkeunggulan, kompetitif dan bersinergi melalui pengembangan kemampuan/ ketrampilan sumber daya manusia serta pengembangan sikap dan semangat kewirausahaan yang berjiwa kooperatif. Peruntukan proyek tersebut meliputi :

- a. Administrasi proyek : Rp. 6.780.000,-
- b. Pengembangan usaha ekonomi : RP. 33.936.000,-

Promosi kewirausahaan :

Temu konsultasi usaha baru/ unggulan dalam rangka mengembangkan peluang usaha dengan koperasi/ BUMN/ BUMS 50 PKM produk unggulan yang mempunyai peluang untuk mengembangkan usahanya  
Identifikasi calon usaha baru 25 PKM yang telah mulai usahanya kurang lebih selama 2 tahun.

Desiminasi peluang usaha :

Temu konsultasi peluang usaha/ kelompok tani/ koperasi/ KUD dengan dinas/ instansi terkait kelompok KUD rukun tani kecamatan Jetis (35 anggota), dengan instansi pembina dari Dinas Koperasi dan PERINDAG.

Magang pengurus/ pengelola dalam rangka pematapan kelembagaan untuk pengembangan budaya wirausaha : 8 pengurus/ pengelola koperasi di koperasi wanita Kartika Chandra Kabupaten Pasuruan.

Pengembangan dan penetapan inovasi teknologi lokal :

Pembinaan pengembangan dan pematapan sarana dan prasarana usaha koperasi pada 19 KUD pelaksana program pangan.

Pembinaan pengembangan produk usaha simpan pinjam pada 35 koperasi/ KUD yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam.

Pemantauan dan evaluasi usaha simpan pinjam koperasi pada 35 koperasi/ KUD yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam.

Temu konsultasi pengembangan dan pematapan peralatan pra dan pasca panen bagi koperasi/ KUD pada 11 KUD pelaksana program pangan.

Pameran dagang/ promosi pameran dalam rangka HUT RI di Surabaya

- c. Pengembangan koperasi dan pengusaha kecil Rp. 4. 635. 000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pengembangan kemitra usaha.

Temu usaha/ kemitraan pengusaha kecil menengah dan koperasi mempertemukan 50 orang dari PKM unggulan dan koperasi yang telah mampu melaksanakan kemitra usaha.

Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 5. 14.: PROYEK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA PKMK DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2001**

NO.	PERUNTUKAN PROYEK	JUMLAH (000)	KETERANGAN
1.	Administrasi	6. 780	
2.	Pengembangan usaha ekonomi	33. 936	
	- Promosi		
	- Deseminasi peluang usaha		
	- Pengembangan dan pematapan inovasi teknologi lokal		
3.	Pengembangan koperasi dan PKM	4. 635	
	- Kemitra usaha		
	- Temu usaha		
	<b>Jumlah</b>	<b>45. 351</b>	

*Sumber data : Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah : 2001*

#### 6. Pembinaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pembinaan oleh BUMN pada tahun anggaran 2001 meliputi bantuan pinjaman bagi 13 usaha kecil/ koperasi dengan dana sebesar Rp.575. 000. 000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 5. 15.: DAFTAR USAHA KECIL/ KOPERASI YANG DIUSULKAN BANTUAN BUMN TAHUN 2001**

NO.	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	BANTUAN (JUTA)	BUMN
1.	HS. Wahyudi	Kedung Gde	tahu/ tempe	50	Peruri
2.	Supriono	Jetis	bh. Bangunan	50	Peruri
3.	Sidiq	Wr Gunung	pigora	50	Peruri
4.	PK5 Rasa	Tangunan	serba usaha	50	Peruri
5.	Kop Annisa	W Hasym	serba usaha	50	Peruri
6.	KPRI Ush Bakti	Sbr Glagah	serba usaha	50	Peruri
7.	Koperasi Ikama	Jaya Negara	serba usaha	50	Peruri
8.	Sukahar	Dsn. Japan	mebel	25	Perhutani
9.	Jali Priono	Sidoarjo	mebel	25	Perhutani
10.	Islan	Kbn Agung	huler	50	Perhutani
11.	Sri	Empunala	rm. makan	50	A. Pura I
12.	Kopwan Kwg	Dlanggu	serba usaha	50	Peruri
13.	Koptan K s	Trawas	serba usaha	50	Peruri

*Sumber data : Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah : 2001*

#### 7. Pembangunan melalui program dana bergulir

Pembinaan melalui program dana bergulir lembaga keuangan mikro merupakan bagian dari program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi.

Pelaksanaan program tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 169/ MENEK/ IX/ 2001 tanggal 2 September 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Program dana bergulir diberikan kepada 1000 LKM se- Indonesia masing-masing Kabupaten/ Kota mendapatkan bantuan minimal 5 LKM. Setiap LKM mendapatkan Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Dana tersebut dipinjamkan kepada pengusaha mikro anggota LKM masing-masing peminjam maksimal Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah)

- c. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan modal kerja bagi pengusaha mikro : petani, peternak, pengrajin industri kecil/ industri rumah tangga, pedagang kaki lima, kelompok wanita, transmigran dan pengusaha jasa lainnya.

Di Kabupaten Mojokerto pelaksanaan program tersebut diatur dalam surat Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah tanggal 27 Desember 2001 No. 500/ 468/ 406 – 111/ 2001 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir PPD – PSE tahun anggaran 2001. LKM pelaksana program tersebut adalah :

LKM Mina Lestari Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko.

LKM Sumber Rejeki Desa Balongsari Kecamatan Gedeg.

LKM Wanita Jaya Desa Mojowarno Kecamatan Kemlagi.

LKM BMT Arohmah Desa Kepuh Pandak Kecamatan Kutorejo.

LKM Tani Utun Desa Cinandung Kecamatan Dawarblandong.

LKM Krida Mandiri Desa Mojosari Kecamatan Mojosari.

Uraian kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi

kemampuan sumber daya manusia aparatur, sarana prasarana, program kerja, anggaran dalam membina usaha kecil/ koperasi sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 5. 16 : KEMAMPUAN DINAS KOPERASI UKM  
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2001**

NO.	ASPEK TINJAUAN	JUMLAH	KETERANGAN
I.	SDM APARATUR		
1.	Golongan/ pangkat		
	- IV	7 orang	
	- III	27 orang	
	- II	5 orang	
	- I	-	
2.	Pendidikan sekolah		
	- S - 2	4 orang	
	- S - 1	13 orang	
	- Sarmud	4 orang	
	- SMTA	18 orang	
	- SMTP	-	
	- SD	-	
3.	Pendidikan teknis koperasi		
	- Pejabat	16 orang	
	- Staf	10 orang	
4.	Masa kerja		
	- 0 - 9 tahun	6 orang	
	- 10 - 19 tahun	27 orang	
	- 20 - 29 tahun	6 orang	
	- 30 - 49 tahun	-	
II.	SARANA/ PRASARANA		
1.	- Tanah	1 kavling	
2.	- Bangunan/ gedung	2 buah	
3.	- Kendaraan	18 buah	
4.	- Peralatan kantor (komp, msn ketik, tlp, faks, OHP, sits)	7 buah	
III.	PROGRAM KERJA		
1.	PROGRAM KERJA		
2.	Rencana strategik 2001 - 2005	-	sdh tersusun
3.	Program kerja 2001	-	sdh tersusun
	Proyek-proyek		
	- Peningkatan prod UKM/ Koperasi	-	tlh dilaks
	- Identifikasi UKM dan penciptaan jaringan usaha	-	tlh dilaks
	- Pemberdayaan koperasi	-	tlh dilaks
	- Peningkatan iklim pendukung PKMK	-	tlh dilaks
	- Peningkatan prod PKMK	-	tlh dilaks
	- Bantuan modal BUMN	-	sdg berjalan
	- Modal bergulir LKM	-	tlh dilaks



IV.	<b>ANGGARAN KEUANGAN</b>		
1.	Anggaran rutin		
	- Belanja pegawai		
	- Belanja non pegawai	Rp. 358.315.000,-	
2.	Anggaran pembangunan	Rp. 17.400.000,-	
	- Peningkatan prod UKM		
	- Identifikasi UKM dan penciptaan jaringan usaha	Rp. 50.000.000,- Rp. 75.000.000,-	
	- Pemberdayaan koperasi		
	- Peningkatan iklim penduk PKMK	Rp. 75.000.000,- Rp. 45.808.000,-	
	- Peningkatan prod ush PKMK		
	- Bantuan modal BUMN	Rp. 45.351.000,-	
	- Modal bergulir LKM	Rp. 575.000.000,- Rp. 300.000.000,-	Bantuan langsung Bantuan langsung

*Sumber data : diolah dari hasil penelitian : 2001*

### 5.3. Usaha Kecil/ Koperasi di Kabupaten Mojokerto

#### 5.3.1. Kriteria Usaha Kecil

Undang – undang nonor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 memberikan batasan tentang usaha kecil :

“Usaha kecil, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai di atur dalam undang – undang ini”.

Kriteria usaha kecil selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), penjelasannya, yang dimaksud dengan hasil tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa dari usahanya dalam satu tahun buku.

Walaupun dalam undang - undang di tetapkan batas kekayaan bersih atau hasil tahunan tersebut, usaha kecil yang mendapatkan prioritas

Pemberdayaan adalah usaha kecil yang merupakan lapisan terbesar dari jumlah usaha kecil yang ada.

c. Milik warga negara Indonesia

Yang dimaksud dengan milik warga Indonesia adalah usaha kecil yang sepenuhnya milik warga negara Indonesia.

Pemilik usaha kecil tersebut dapat mengelolanya sendiri atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain.

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.

e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

f. Kriteria tersebut diatas mengenai nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan pemerintah.

g. Sedangkan usaha menengah dan usaha besar, adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

### **5.3.2. Data Usaha Kecil**

Data tentang usaha kecil di Kabupaten Mojokerto meliputi : usaha kecil yang telah terdaftar dan suaha kecil yang belum terdaftar.

Sebagian besar usaha kecil belum berbentuk badan usaha, belum memiliki perizinan, cepat terbentuk/ bertambah tetapi juga cepat berubah/ berhenti kegiatan usahanya.

Dari data yang ada jumlah usaha kecil terdapat  $\pm$  658 buah, dengan tenaga kerja  $\pm$  4. 892 orang, volume usaha  $\pm$  Rp. 2. 228. 000. 000,- sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 5. 17.: DATA USAHA KECIL DI KABUPATEN MOJOKERTO**

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Usaha Kecil		keterangan
			formal	Informal	
1.	Usaha kecil	usaha	656	-	
2.	Tenaga kerja	orang	4. 892	-	
3.	Volume usaha	(Rp. juta)	23. 919	-	
4.	Nilai investasi	(Rp. juta)	2. 228	-	
5.	Penyerapan bahan baku				

*Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah : 2001*

Dari penelitian secara sampling terhadap 87 usaha kecil/ koperasi pada 18 kecamatan se Kabupaten Mojokerto hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Usaha kecil/ koperasi pada 18 kecamatan tingkat pendidikan pengusaha : SD 27, 2 %, SMTP 45, 83 %, SMTA 23, 7%, S1 2, 8%.

Pembinaan yang pernah diikuti : 55, 8 % belum pernah mengikuti pembinaan, pernah mengikuti pembinaan manajemen 26, 3 %, wira usaha 13, 8%, pemasaran 4, 1 %.

Jenis usaha : non pertanian 61, 1 %, pertanian 27, 8 %, jasa perdagangan 11, 1 %.

Modal usaha : modal 1 - 49 juta 59, 8 %, 50 - 99 juta 20 %, 100 - 149 juta 9, 7 %, 150 - 200 juta 9, 7 %.

Omset usaha perbulan : omset 1 - 9 juta 41, 6 %, 10 - 49 juta 16, 6 %, 50 - 99 juta 16, 6 %, 100 juta keatas 25, 2 %.

Jumlah tenaga kerja : 1 - 9 orang 52, 8 %, 10 - 49 orang 45, 8 %, 50 - 49 orang 1, 4 %.

Pemasaran usaha : 100 % pemasaran ke dalam negeri.

Permasalahan yang dihadapi usaha kecil/ koperasi : masalah modal 56, 9 %, pemasaran 30, 5 %, peralatan 6, 95 % dan masalah bahan baku 5, 5 %.

Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

**TABEL : 5. 18 : DATA USAHA KECIL/ KOPERASI HASIL PENELITIAN PADA 18 KECAMATAN SE KABUPATEN MOJOKERTO**

ONO.	KECAMATAN	PENDIDIKAN				PEMBINAAN				JENIS USH				MODAL (JUTA)				OMZET/BLN				TENAGA KERJA				PMSRN				PERMASALAHAN																							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																				
1.	Puri	1	1	2	1	1	1	3	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2												
2.	Soko	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
3.	Trowulan	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1								
4.	Bangsral	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1				
5.	Mojosari	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
6.	Gedeg	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
7.	Kemlagi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Dawar Bld	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1
9.	Jetis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	Mojosari	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
11.	Pungging	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	Ngoro	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1
13.	Kutorejo	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1				
14.	Dhlanggu	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1				
15.	Pacet	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1				
16.	Jatrejo	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1				
17.	Gondang	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1				
18.	Trawas	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1				
	Jumlah	2	17	23	20	19	10	3	40	20	44	8	43	15	7	7	30	12	12	18	38	33	1	1	22	22	47	22	5	4	22	5	4	4	56,9	30,5	6,9	5,5															
	Persen ( , % )	2,8	23	45	27	26	13	4,1	55	27	61	11	59	20	9,7	9,7	41	16	16,6	25,2	52,8	45,8	1,4	1,4	30,5	69	56,9	30,5	6,9	5,5																							

Sumber data : Diolah dari hasil penelitian 2001

Keterangan	: Pendidikan	Jenis Usaha	Tenaga Kerja	Pemasaran	Permasalahan
1.SI	1.Menejemen	1.Pertanian	1.1 - 9 Org	1. D. Negeri	1.Modal
2.SMTA	2.Pjura Usaha	2.Non Pertanian	2.10 - 49 Org	2.L. Negeri	2.Pemasaran
3.SMTP	3.Pemasaran	3.Jasa	3.50 - 99 Org		3.Peralatan
4.SD	4.Belum Pernah		4.100 dst		4.Bahan

a. Usaha kecil/ koperasi (baru) berpotensi produk unggulan :

Tingkat pendidikan pengusaha : SD 13, 3 %, SMTP 26, 6 %, SMTA 53, 3 %, dan Sarjana 6, 8%.

Pembinaan yang pernah diikuti : pembinaan manajemen usaha 53, 3 %, pembinaan wira usaha 13, 3, pembinaan lainnya 33, 4 %.

Jenis usaha : non pertanian 80 %, usaha bidang pertanian 13, 3 %, usaha jasa 6, 7 %.

permodalan : 1 - 49 juta 73, 3 %, 50 - 99 juta 6, 8 %, 150 - 200 juta 19, 9 %.

Omset perbulan : omset 1 - 9 juta 60, 8 %, 100 juta keatas 6, 8 %, 50- 99 juta 6, 8 %, 10 - 49 juta 26, 6 %.

Jumlah tenaga kerja : 1 - 9 orang 46, 7 %, 10 - 49 orang 53, 3 %, 50 - 99 orang 6, 8 %, 100 - 499 orang 6, 8 %, 500 - 999 orang 6, 8 %, 1000 orang keatas 6, 8 %.

Pemasaran usaha : 100 % dalam negeri.

Permasalahan yang dihadapi: masalah modal 86, 4 %, masalah pemasaran 6, 8 %, peralatan 6, 8 % sebagaimana tabel berikut :

TABEL : 5. 19 : KEADAAN PENGUSAHA KECIL/ KOPERASI PRODUK UNGGULAN EKSPORT

NO.	NAMA	ALAMAT	USAHA/ KOPERASI	PENDIDIKAN				PEMBINAAN				JENIS USH				MODAL (JUTA)				OMZET/ BLN				TENAGA KERJA				PERMASALAHAN			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Eko P	Jetis	Tas	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Tain	Puri	Kopjan	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Fauzi A. Spd	Sooko	Sepatu	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Miftachul F	Gedeg.	Gitar	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Supardi	Mj Anyar	Boreka	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Parmudji	Puri	KSP	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Budi Ha	Jetis	Tas	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Achmad Z	Sooko	Bangunan	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Choirul U	Ki Rejo	Pigora	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Ach Basuni K	Bangsai	Genteng	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Mitsyuda	Gondang	Tahu	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Nur F	Punggging	Konveksi	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kismil K	Jl Rejo	Bordir	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Sugiono	Puri	Kampar	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Karyono	Jetis	Tahu	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah			1	8	4	2	6	8	2	2	5	2	13	13	33	13	80	6,7	73	6,8	19	60	26	6,8	4,6	53	13	1	1	1
	Prosen ( , %)			6,8	53	26	13	53	13	13	13	33	13	80	6,7	73	6,8	19	60	26	6,8	4,6	53	13	1	1	1	86	6,8	6,8	6,8

Sumber data : Diolah dari hasil penelitian 2001

Keterangan : Pendidikan : I.SI 2.SMTP 3.SMTP 4.SD  
 :Pendidikan : I.Pertanian 2.Non Pertanian 3.Jasa  
 Jenis Usaha : I.Menejemen 2.Wira Usaha 3.Pemasaran 4.Belum Pernah  
 Pembinaan : I.Menejemen 2.Wira Usaha 3.Pemasaran 4.Belum Pernah  
 Omzet : I.1 - 9 Ji 2.10 - 49 Ji 3.50 - 99 Ji 4.100 dst  
 Tenaga Kerja : I.1 - 9 Org 2.10 - 49 Org 3.50 - 99 Org 4.100 dst  
 Pemasaran : I.D. Negeri 2.L. Negeri  
 Permasalahan : I.Modal 2.Pemasaran 3.Peralatan 4.Bahan

### 5.3.3. Koperasi

Undang-undang koperasi yang baru, yaitu UU No. 25 tahun 1992 memberikan batasan yang tegas tentang koperasi sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan”.

Dengan batasan tersebut kedudukan koperasi adalah sama dengan badan usaha lainnya yang bertujuan mencari keuntungan, dalam koperasi juga terdapat fungsi yang mendukung penyelenggaraan usaha koperasi tetapi bila diteliti akan terdapat perbedaan yang mendasar antara koperasi dengan badan usaha lainnya, perbedaan tersebut disebut sebagai ciri-ciri koperasi.

Ciri-ciri koperasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu : segi pelakunya, segi usahanya dan segi hubungannya dengan negara. (Revrisond Baswir, 2000 : 25).

#### a. Koperasi ditinjau dari segi pelakunya,

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa anggota koperasi karena keterbatasan ekonomi tidak mampu melibatkan diri dalam kerjasama ekonomi melalui badan usaha lain selain koperasi. Walaupun demikian tidak dapat diabaikan bahwa koperasi didirikan oleh orang-orang yang berkemampuan ekonomi terbatas sebagai media untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lebih kuat.



Dengan latar belakang seperti itu koperasi memiliki kelembagaan yang sangat kuat menjadi sebuah perusahaan yang tumbuh dan mengakar pada lapisan masyarakat bawah. Mereka terdiri dari para karyawan pabrik, petani kecil, pedagang kecil, nelayan dan kelompok-kelompok ekonomi lemah lainnya.

b. Koperasi ditinjau dari tujuannya

Tujuan koperasi pada dasarnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karena anggota koperasi secara keseluruhan terdiri dari warga kelompok masyarakat yang berbeda-beda, maka tujuan koperasi secara khusus akan ditentukan oleh permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para anggotanya.

c. Koperasi ditinjau dari hubungannya dengan negara

Umunya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan negara. Keberadaan koperasi sangat membantu pemerintah dalam usahanya mewujudkan perekonomian yang lebih adil.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Kehidupan koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan koperasi seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen usaha, pendidikan, pembinaan dan sebagainya.

Dalam perkoperasian dikenal : koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotaan orang seorang, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi

Selanjutnya, keseluruhan organisasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi disebut dengan istilah gerakan koperasi.

#### 5.3.4. Data Koperasi

Gerakan koperasi yang menjadi binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto terdapat sejumlah 318 koperasi, dalam kondisi aktif 257 koperasi, tidak aktif sejumlah 53 koperasi, koperasi baru 8 koperasi. Adapun jenis koperasi terdapat 22, yaitu :

- KUD : 19 koperasi
- KOPONTREN : 39 koperasi
- KOPINKRA : 8 koperasi
- KOPTI : 51 koperasi
- KOPKAR : 2 koperasi
- Koperasi angkutan barang : 2 koperasi
- Koperasi serba usaha : 11 koperasi
- KOPPAS : 7 koperasi
- KSP : 9 koperasi
- Koperasi wisata : 1 koperasi
- KBPR : 2 koperasi
- KOPWAN : 54 koperasi
- Koperasi profesi : 1 koperasi
- Koperasi wredatama : 1 koperasi
- Koperasi pemuda : 4 koperasi

- Koperasi PK5	:	4	koperasi
- Koperasi jamu gendong	:	1	koperasi
- Koperasi tani	:	43	koperasi
- Koperasi lainnya	:	25	koperasi
- Koperasi sekunder	:	3	koperasi
Jumlah	:	318	koperasi

Jumlah anggota koperasi di Kabupaten Mojokerto adalah 155.437 orang, jumlah manajer 81 orang, jumlah karyawan 706 orang, jumlah modal adalah Rp. 65.670.849.000,-. Volume usaha tahun sebelumnya (2000) Rp. 104.450.476,- pada tahun berjalan (2001) Rp. 72.891.152,-. Uraian lengkapnya sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 5.22 : KEADAAN KOPERASI DI KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	JENIS KOPERASI	KONDISI KOPERASI (UNIT)				KETER
		Aktif	Tdk Aktif	Baru	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1	KUD	19	-	-	19	
2.	Kopontren	24	15	-	39	
3.	Kopinkra	4	4	-	8	
4.	Kopti	1	-	-	1	
5.	KPRI	49	2	-	51	
6.	Kopkar	23	9	-	32	
7.	Kop angkutan darat	2	-	-	2	
8.	Kop angkutan laut	-	-	-	0	
9.	Kop angkutan udara	-	-	-	0	
10.	Kop kepolisian	2	-	-	2	
11	Kop serba usaha	7	4	-	11	
12	Koppas	6	1	-	7	
13	KSP	6	2	1	9	
14	Kop angkutan darat	-	-	-	0	
15	Kop angkutan laut	-	-	-	0	
16	Kop wisata	1	-	-	1	
17	Kop telkom	-	-	-	0	
18	Kop perumahan	-	-	-	0	
19	KBPR	2	-	-	2	
20	KOPWAN	54	-	-	54	
21	Kop profesi	-	1	-	1	
22	Kop veteran	-	-	-	0	
23	Kop wredatama	1	-	-	1	
24	Kop Pepabri	-	-	-	0	
25	Kop mahasiswa	-	-	-	0	
26	Kop pemuda	-	4	-	4	
27	Kop pertambangan	-	-	-	0	
28	Kop PK lima	2	-	-	2	
29	Kop jamu gendong	-	1	-	1	
30	Kop tani	36	-	7	43	
31	Kop lainnya	16	9	-	25	
	Sub jumlah	255	52	8	315	
32	Kop sekunder	2	1	-	3	
	Total	257	53	8	318	

*Sumber data : Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah : 2001*

### 5.3.5. Pembinaan Usaha Kecil/ Koperasi

Maksud dan tujuan pembinaan usaha kecil/ koperasi adalah untuk mewujudkan pengusaha kecil menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri dalam mengembangkan usahanya yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga barang dan jasa yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi era globalisasi.

Kebijakan dasar pembinaan untuk usaha kecil koperasi adalah merupakan tanggung jawab dari semua para pelaku ekonomi baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan kepedulian yang mendasar dari semua pihak yang terkait serta langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kondisi usaha kecil/ koperasi yang dibina. Adapun langkah-langkah tersebut adalah :

1. Pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan secara langsung kepada pengusaha kecil yang bersangkutan dalam berbagai aspek kewirausahaan.
2. Pembinaan diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia dari pengusaha kecil/ koperasi yang bersangkutan termasuk lingkungannya dengan tujuan mempersiapkan pengusaha-pengusaha yang mempunyai kemampuan usaha yang handal serta mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai.
3. Agar pembinaan efektif, diciptakan kelompok binaan dalam wilayah yang tidak terlalu luas di Desa/ Kecamatan di bawah tanggung jawab pihak tertentu yang memahami permasalahan kewirausahaan.

4. Pembinaan secara terpadu dari semua pihak terkait dari berbagai aspek seperti : aspek teknis, pemasaran, pendanaan, menejemen usaha dan lain-lain.
5. Memacu pola kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan koperasi. Cara pembinaan usaha kecil/ koperasi yang dilaksanakan adalah melalui :
  - Penyuluhan
  - Pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikan seperti magang, studi banding
  - Temu usaha
  - Bimbingan
  - Konsultasi
  - Evaluasi

berikut adalah kegiatan pengelolaan pembinaan usaha kecil/ koperasi di Kabupaten Mojokerto 2001 meliputi : program pembinaan pengorganisasian, aktivitas pembinaan dan pengawasan :

a. Program pembinaan

Sesuai dengan uraian sebelumnya, program pembinaan usaha kecil koperasi Kabupaten Mojokerto telah tersusun dalam :

1. Rencana strategik 2001 – 2005
2. Perencanaan program kerja tahun 2001
3. Rencana pembinaan usaha kecil/ koperasi dana proyek APBD II 2001
4. Rencana pembinaan usaha kecil/ koperasi dana APBN 2001

5. Rencana pembinaan bantuan BUMN 2001
6. Rencana pembinaan melalui program dana bergulir lembaga keuangan mikro 2001.

Program pembinaan tersebut baru tersusun pada bulan Desember 2001, disebabkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di resmikan pada 19 April 2001. Dari penelitian dapat diketahui bahwa program tersebut belum dapat dilaksanakan efektif kecuali :

- Rencana pembinaan usaha kecil/ koperasi dana APBD II 2001
- Rencana pembinaan usaha kecil/ koperasi dana, APBN 2001
- Rencana pembinaan bantuan BUMN 2001
- Rencana pembinaan melalui program dana bergulir lembaga keuangan mikro 2001

b. Pengorganisasian

Dalam pelaksanaan pembinaan usaha kecil/ koperasi melalui pemberdayaan staf yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Mojokerto nomor 21 tahun 2001, tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk pembinaan usaha kecil/ koperasi yang dananya berasal dari proyek APBD II, diterbitkan surat keputusan Bupati yang menunjuk pimpinan proyek dan bendahara proyek.

Proyek pembinaan yang dananya berasal dari APBN, pengorganisasian ditetapkan dengan surat keputusan rencana operasional pelaksanaan proyek tingkat I Jawa Timur.

Proyek pembinaan usaha kecil/ koperasi bantuan badan usaha milik negara/ badan usaha milik swasta ditetapkan tim pembina tingkat I dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur, ditingkat Kabupaten/ Kota ditetapkan tim pembina dengan surat keputusan Bupati/ Walikota.

Proyek pembinaan dalam rangka program dana bergulir, tim pembina ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/ Walikota terdiri dari  $\pm$  11 orang dari unsur instansi terkait, bank pelaksana, perguruan tinggi, tokoh masyarakat setempat.

Efektifitas pelaksanaan pembinaan usaha kecil/ koperasi membutuhkan dukungan staf. Saat ini jumlah pejabat dan staf pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 39 orang terdiri 22 pejabat struktural dan 17 staf. Dari jumlah staf 17 orang, penugasannya masih bersifat umum tergantung kebutuhan yang ada, belum ditunjuk khusus pembinaan usaha kecil/ menengah yang tersebar di kecamatan/ desa/ kelurahan.

Efektifitas penugasan staf dalam pembinaan usaha kecil/ koperasi perlu dilakukan perencanaan yang matang, baik kesiapan kemampuan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana khususnya kendaraan, pembiayaan yang memadai.

Kesiapan usaha kecil/ koperasi yang dibina dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembuatan laporan hasil pembinaan untuk mengetahui perkembangan usaha kecil/ koperasi yang dibina (hasil wawancara dengan Kasubdin tanggal 20 November 2001).

### c. Aktivitas pembinaan

#### 1. Materi pembinaan



Materi pembinaan usaha kecil koperasi di Kabupaten Mojokerto menggunakan pedoman petunjuk pembinaan pengusaha kecil di Jawa Timur 1996, pedoman pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh BUMN di Jawa Timur 1997, petunjuk pelaksanaan proyek Pengembangan usaha mikro dari Menteri Negara Koperasi dan UKM 2001.

Materi pembinaan usaha kecil/ koperasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto belum dibuat khusus/ tertulis. Pembinaan usaha kecil/ koperasi diarahkan untuk meningkatkan menjadi tangguh dan mandiri :

- a. Memiliki jiwa kewirausahaan
- b. Memiliki perijinan usaha
- c. Memiliki administrasi usaha
- d. Menyerap tenaga kerja
- e. Memiliki perencanaan usaha
- f. Memiliki modal yang memadai
- g. Penggunaan teknologi tepat
- h. Memiliki jaringan usaha
- i. Memiliki kinerja yang meningkat
- j. Membayar pajak secara teratur
- k. Memiliki kesadaran lingkungan

Adapun materi pembinaan pada tahap dasar adalah terdiri dari :

- a. Kewirausahaan, meliputi:
  - Arti, fungsi dan ciri-ciri wirausaha,

- Pengembangan motivasi berprestasi,
  - Perencanaan dan pengendalian usaha,
  - Kiat dalam mobilisasi dan penggunaan sumber daya
- b. Pemasaran, meliputi
- Pemasaran,
  - Salesmanship/ kiat dan seni menjual,
  - Pembelian/ penjualan
- c. Permodalan, meliputi:
- Pedoman usaha,
  - Pengelolaan keuangan,
  - Lembaga keuangan dan prosedur perkreditan
- d. Manajemen, meliputi:
- Dasar-dasar perkoperasian/ kemitraan
  - Administrasi umum
  - Administrasi keuangan
- e. Pengembangan kemampuan teknologi
- Penataan barang dan logistik
- f. Aplikasi pengembangan kewirausahaan, meliputi
- Pengenalan dan pengembangan pribadi
  - Pengenalan dan pengendalian lingkungan serta perencanaan konsolidasi
- g. Aplikasi perencanaan konsolidasi/ pengembangan usaha.
- h. Penunjang/ pelengkap
- Kebijakan pnbinaan usaba kecil/ koperasi

- Kiat keberhasilan seorang wirausahawan

Dari hasil penelitian, materi pembinaan koperasi usaha kecil telah disesuaikan dengan pedoman yang ada, hanya tidak di bukukan. Materi yang paling banyak diberikan adalah organisasi dan manajemen pembinaan usaha kecil/ koperasi.

Jumlah pengusaha kecil/ koperasi yang pernah pernah mendapatkan pembinaan adalah  $\pm 44, 2\%$  :

- sejumlah  $\pm 26, 3\%$  pernah mengikuti pembinaan manajemen
- sejumlah  $\pm 13, 8\%$  pernah mengikuti pembinaan kewirausahaan
- sejumlah  $\pm 4, 1\%$  pernah mengikuti pembinaan pemasaran

Adapun materi pembinaan yang di butuhkan adalah sebagai berikut :

- 60 % pengusaha. kecil/ koperasi membutuhkan pembinaan yang dapat meningkatkan akses modal
- 20 % membutuhkan pembinaan yang dapat meningkatkan pemasaran
- 10 % membutuhkan pembinaan yang dapat meningkatkan kemudahan memperoleh bahan baku
- 10 % membutuhkan pembinaan yang dapat meningkatkan kemitraan, penguasaan teknologi, administrasi, organisasi, manajemen dan lain-lain

## 2. Pelaksanaan kegiatan

### a. Perencanaan strategik 2001 - 2005

Perencanaan strategik Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2001-2005 telah selesai disusun drafnya pada bulan Desember 2001 belum efektif diberlakukan.

b. Program kerja tahun 2001

Program kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2001 di susun pada bulan Juli 2001, merupakan program kerja transisi, belum didukung anggaran APBD II, belum dapat dilaksanakan secara efektif.

c. Pelaksanaan pembinaan dengan anggaran proyek APBD II tahun 2001

Pembinaan usaha kecil/ koperasi dengan dana APBD 2001 dimulai bulan Juli sampai dengan Desember 2001. Pembinaan berjalan efektif sesuai dengan rencana/ daftar isian proyek.

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan produktivitas usaha kecil/ koperasi untuk peningkatan kemampuan usaha lembaga pra koperasi : 4 Kecamatan.
- Bantuan peralatan/ pelatihan manajemen usaha kecil kerajinan bordir 20 usaha kecil, pigora 20 usaha kecil, gibs 20 usaha kecil.
- Identifikasi dan penciptaan jaringan usaha :  
Identifikasi usaha kecil baru 2 usaha kecil, UKM unggulan 5 buah, UKM. peluang ekspor 3 buah, bantuan peralatan 2 usaha kecil, penciptaan jaringan usaha 4 usaha kecil/ koperasi, pengalangan kemitraan 2 usaha kecil/ koperasi, bimbingan teknis permodalan dengan BUMN/ BUMS 2 usaha kecil/ koperasi, promosi, pelatihan teknis manajemen usaha 20 usaha kecil/ koperasi, produksi dan pemasaran 20 usaha kecil/ koperasi.
- Pemberdayaan koperasi  
Pengembangan ekonomi kerakyatan : penyusunan program 48 koperasi, pemberdayaan 25 koperasi, inventarisasi kredit program 40

koperasi, pembinaan proposal untuk kredit ke bank 40 usaha kecil/  
koperasi, temu usaha 40 koperasi, temu kemitraan 40 usaha kecil/  
koperasi.

- Pengembangan kelembagaan : profil/ klarifikasi koperasi 60 koperasi, bimbingan administrasi 60 koperasi, RAT 30 koperasi.
- Pengembangan usaha kecil/ koperasi : penilalan kesehatan 40 usaha kecil/ koperasi, koordinasi 20 usaha kecil/ koperasi, jaringan usaha 20 usaha kecil/ koperasi.

3. Pelaksanaan pembinaan dengan dana APBN 2001, meliputi :

- Peningkatan iklim pendukung usaha kecil/ koperasi perkuatan pembiayaan kredit simpan pinjam 11 koperasi, penataan administrasi 25 koperasi, temu usaha/ semiloka 50 orang, monitoring dan evaluasi 9 koperasi, pengembangan dan perkuatan jaringan dan kemitraan 48 koperasi, monitoring 70 koperasi, advokasi 60 koperasi, pelaksanaan peraturan perundang-undangan koperasi kepada 81 koperasi, pengawasan terhadap 75 koperasi/ penilaian kesehatan KSP/ USP 75 koperasi, pemuthakiran data 276 koperasi, penyusunan direktori 20 pengusaha kecil dan menengah.
- Peningkatan produktivitas usaha Pembinaan 50 usaha kecil produk unggulan, usaha baru 25 usaha kecil/ koperasi, temu konsultasi 35 usaha kecil/ koperasi, magang 8 usaha kecil/ koperasi, pembinaan sarana produksi 19 Koperasi/ KUD, simpan pinjam 35 koperasi, temu konsultasi prasarana pasca panen 11 koperasi, promosi/ pameran, temu kermitra

usaha 50 PKM. Uraian pembinaan usaha kecil/ koperasi dana APBD II dan APBN.

#### 4. Pembinaan bantuan badan usaha milik nasional

Pembinaan usaha kecil/ koperasi dari bantuan pinjaman dana badan usaha milik nasional tahun 2001 diperuntukkan bagi 13 usaha kecil/ koperasi senilai Rp.575.000.000,- masih belum dilaksanakan.

#### 5. Pelaksanaan bantuan melalui program dana bergulir LKM

Realisasi pembinaan usaha kecil/ koperasi kepada 6 LKM dari dana penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi tahun 2001 baru dilaksanakan pada bulan Januari 2001.

#### d. Pengawasan

Kegiatan pengawasan pembinaan usaha kecil/ koperasi dilakukan mulai proses, penyusunan rencana, pengorganisasian, aktivitas pelaksanaan oleh kepala dinas dalam bentuk pengawasan melekat dan pengawasan fungsional oleh badan pengawas daerah, badan pengawas keuangan.

Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen adalah merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan (T.Hani Handoko: 1997: 357). Pengertian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan.

Pengawasan yang efektif disyaratkan :

- pengawasan dengan benar
- tepat waktu

- akurat
- dengan biaya yang efektif
- dapat diterima oleh yang bersangkutan

Dari penelitian di temukan bahwa, sistem pengawasan melekat oleh atasan langsung Kabag/ Kasubdin dalam pembinaan usaha kecil/ koperasi masih kurang efektif (hasil wawancara dengan Kasubag/ Kasubdin tanggal 1 Desember 2001).

e. Kendala-kendala dalam pembinaan usaha, kecil/ koperasi :

1. Pemberdayaan sumber daya manusia aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur Dinas Koperasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan usaha kecil/ koperasi. Dari hasil penelitian kendala pemberdayaan sumber daya manusia aparatur yang ditemui adalah :

- Kurangnya unsur staf, dari 39 orang pegawai 22 orang adalah pejabat struktural dan 17 orang unsur staf. Selain itu unsur staf yang bertugas membina usaha kecil/ koperasi di wilayah binaan kecamatan dan desa belum berjalan efektif (hasil wawancara dengan Kasi Kepegawaian pada tanggal 28 Desember 2001 ).
- Sebetulnya penempatan staf di wilayah binaan oleh UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) dapat menjadi alternatif pertimbangan agar pembinaan usaha kecil/ koperasi di desa/ kecamatan lebih efektif dan efisien (wawancara dengan tim analisis jabatan tanggal 5 November 2001).

## 2. Belum optimalnya pembinaan usaha kecil/ koperasi

Pembinaan usaha kecil/ koperasi di Kabupaten Mojokerto belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dari penelitian di ketahui bahwa 55, 8 % pengusaha kecil/ koperasi belum pernah mengikuti pembinaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Disisi lain bahan atau materi pembinaan belum optimal memecahkan masalah yang di hadapi usaha kecil/ koperasi, menurut penelitian  $\pm$  56, 9% masalah modal,  $\pm$  30, 5 % masalah pemasaran,  $\pm$  6, 9 % masalah peralatan dan  $\pm$  5, 5 % masalah bahan baku.

## 3. Dana anggaran pembinaan

Keterbatasan dana/ anggaran merupakan kendala pembinaan usaha kecil/ koperasi. Dana/ anggaran bersumber dari dana proyek APBD II, APBN dan bantuan BUMN. Sejauh ini belum ada pembinaan yang di danai oleh sektor swasta dan atau dari usaha kecil koperasi sendiri.

## 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia usaha kecil/ koperasi

Dari penelitian 73 % Lulusan SD/ SLTP, 23, 7 % lulusan SMTA dan 2, 8% lulusan S I.

## f. Prestasi tahun 2001

Dalam tahun 2001 Kabupaten Mojokerto mendapatkan penghargaan tingkat nasional, tingkat Propinsi Jawa Timur dan prestasi khusus bagi usaha kecil/ koperasi yang telah membayar pajak kepada negara.

Adapun prestasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Koperasi unit desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo mendapatkan penghargaan predikat KUD berprestasi Tingkat Nasional tahun 2001.

KUD Dinoyo mempunyai anggota, 5. 047 orang,



Jumlah pengurus 3 orang

Jumlah pengawas I orang

Jumlah karyawan 15 orang

Modal sendiri Rp. 472.679.731,

Modal luar Rp. 1.119.405.146,

SHU tahun berjalan Rp. 81.841.768,

Volume usaha Rp. 1.958.717.669,

KUD Dinoyo disamping dapat mempertahankan kinerjanya sebagai KUD model 1985, KUD Mandiri 1992, mampu mengembangkan usaha non program antara lain :

- Unit usaha batu bara
- Unit usaha pelayanan listrik
- RMU
- Simpan pinjam
- Pengolahan kayu.

2. Koperasi Karyawan Guntur, Perusahaan Listrik Negara Mojokerto mendapatkan predikat KOPKAR berprestasi Tingkat Propinsi Jawa Timur tahun 2001.

Kopkar Guntur berdiri 5 Mei 1990, memiliki 14 unit usaha yang paling dominan adalah usaha simpan pinjam, unit pengadaan barang dan jasa, unit pengerahan tenaga kerja.

Memiliki anggota 301 orang,

3 orang pengurus, 2 orang pengawas dan 5 karyawan

Jumlah modal sendiri Rp. 291.423.752,-,

Modal luar Rp. 773.587.676,-,

Sisa hasil usaha berjalan Rp. 129.945.803,

Volume usaha Rp. 1.335.920.908,-

3. Koperasi pertanian Idaman, Desa Pacet, Kecamatan Pacet Mojokerto sebagai koperasi berprestasi Tingkat Jawa Timur.

Koperasi tani Idaman berdiri 22 Mei 1999, memiliki anggota 101 orang, memiliki beberapa usaha, simpan pinjam, pertokoan dan lain-lainnya. Jumlah modal Rp.592.647.484,-, modal luar Rp.1.000.884.443,-, sisa hasil usaha berjalan Rp.6.360.900, volume usaha Rp. 617.289.710,-

4. Prestasi dalam membayar pajak kepada negara dari 318 koperasi, 229 koperasi telah membayar pajak kepada negara tahun 2001 sebesar Rp.61.967.988,-

**BAB 6****PEMBAHASAN**

Dalam hal ini akan dibahas secara spesifik hasil penelitian kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam membina usaha kecil/ koperasi, dengan pendekatan paradigma baru pemerintahan reformasi era pelaksanaan otonomi daerah, tuntutan pemerintahan yang baik kaitannya dengan akuntabilitas kinerja instansi/ pemerintah, sistem perencanaan strategik dengan analisis SWOT serta pengembangan sumber daya manusia.

Sebagai instansi pemerintah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, dengan memberdayakan kemampuan atau potensi sumber daya manusia aparatur, sarana – prasaranan, program/ rencana kerja dan sumber daya keuangan secara efektif efisien. Berbeda dengan keadaan sebelumnya, instansi pemerintah tingkat keberhasilan atau kegagalan sulit diukur secara obyektif karena belum ada sistim yang tepat, bahkan tolok ukur yang digunakan adalah pada kemampuan instansi untuk menyerap sumber daya anggaran walaupun penggunaanya belum tentu tepat guna.

Pada masa mendatang tuntutan semakin berat dan kompleks ukuran keberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diperkirakan akan ditentukan sejauh mana kemampuan mengelola sumber daya yang ada secara optimal untuk mewujudkan program atau rencana yang dituangkan dalam perencanaan strategik (Ismail Mohammad : 2000 : 48)

Dengan terbitnya instruksi presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan keputusan Kepala BAKN nomor : 589/ 14/ 614/Y/ 1999 tentang Pedoman pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah efektif diberlakukan pada tahun anggaran 2001. Namun dalam kenyataannya sampai saat penelitian dilakukan, masih sebatas persiapan awal seperti, penyusunan draf awal perencanaan strategik pada instansi pemerintah, penataran dan pelatihan, pembuatan evaluasi kinerja instansi, sistim pelaporan akuntabilitas instansi dan lain-lainnya.

Tata urutan penyusunan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi hal-hal berikut :

- a. Persiapan dan pelaksanaan rencana strategik.
- b. Menetapkan visi, misi, faktor kunci keberhasilan, tujuan sasaran dan strategi serta melaksanakan dengan konsisten.
- c. Merumuskan indikator kinerja dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan menjadi isu penting dan vital bagi pencapaian visi dan misi.
- d. Melaksanakan dengan berdayaguna berhasil guna tugas pokok dan fungsi sejalan dengan rencana strategik.
- e. Mengukur pencapaian kinerja dengan :
  - Perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target.
  - Perbandingan kinerja aktual dengan tahun tahun sebelumnya.
  - Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara lain atau dengan standar internasional.
- f. Evaluasi kinerja dengan jalan :
  - Menganalisis hasil pengukuran kinerja.

- Menginterpretasikan data yang diperoleh.
  - Membuat pembobotan keberhasilan pencapaian program.
  - Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi.
- g. Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Instruksi Presiden 7: 1999:5).

### **6.1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto**

Pembentukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2001 juncto surat keputusan Bupati nomor: 21 tahun 2001 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.

Dinas Koperasi semula adalah instansi vertikal, karena pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dijadikan dinas daerah. Disamping ditingkatkan dari eselon IIB menjadi IIB, juga diikuti dengan pemberian sumber daya manusia aparatur, pemberian sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas, meubeler, pemberian anggaran rutin untuk operasional dan anggaran proyek pembangunan, serta perangkat kewenangan, tugas pokok dan fungsi, hak-hak tertentu serta kewajiban yang harus dipenuhi sebagai dinas daerah.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Mojokerto tersebut terus dilakukan evaluasi dan upaya peningkatan dengan :

- a. Pembentukan tim dan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis pekerjaan.
- b. Peningkatan potensi dan kemampuan dinas, badan, kantor dan lembaga

lembaga antara lain :

1. Pengembangan sumber daya manusia aparatur :
  - Pemberian kenaikan pangkat pejabat struktural sesuai persyaratan jabatan.
  - Mengadakan pendidikan penjenjangan pemegang jabatan struktural.
  - Mengirimkan pejabat/ staf dalam pendidikan teknis fungsional.
  - Penambahan jumlah sumber daya manusia aparatur melalui pengaturan-pengaturan dan pengangkatan baru.
2. Pemberian sarana-prasarana baru
  - Pembangunan fasilitas kantor.
  - Perlengkapan meubeler.
  - Pengadaan perangkat administrasi.
  - Penyediaan kendaraan dinas.
3. Pembuatan perangkat lunak:
  - Penyusunan pola dasar pembangunan daerah tahun 2001 – 2005.
  - Perencanaan Strategik tahun 2001-2005.
  - Program pembangunan tahun 2002.
4. Penyediaan dana anggaran dari APBD II, meliputi
  - Anggaran rutin.
  - Anggaran pembangunan.
5. Dalam rangka intensitas pengembangan sumber daya manusia dibentuk badan kepegawaian daerah, dilengkapi dengan tenaga pembina, gedung balai pendidikan dan latihan.

6. Pembinaan aparatur melalui jalur kedinasan dalam bentuk rapat staf tiap hari Senin dan Kamis. Pembinaan di luar jalur dinas melalui organisasi Korps pegawai Republik Indonesia dan pembinaan kesejahteraan melalui Koperasi pegawai Republik Indonesia.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto membentuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Eselon II b) disamping didasarkan pertimbangan potensi/ kemampuan yang ada pada Dinas Koperasi , gerakan koperasi serta usaha kecil dan menengah, juga diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kedepan.

## **6.2. Perencanaan Strategik**

Perencanaan strategik Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2001 - 2005 saat penelitian dilakukan masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Untuk mengetahui keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan rencana strategik selain ditinjau dari proses pembahasannya, juga ditentukan oleh tiga hal, yaitu :

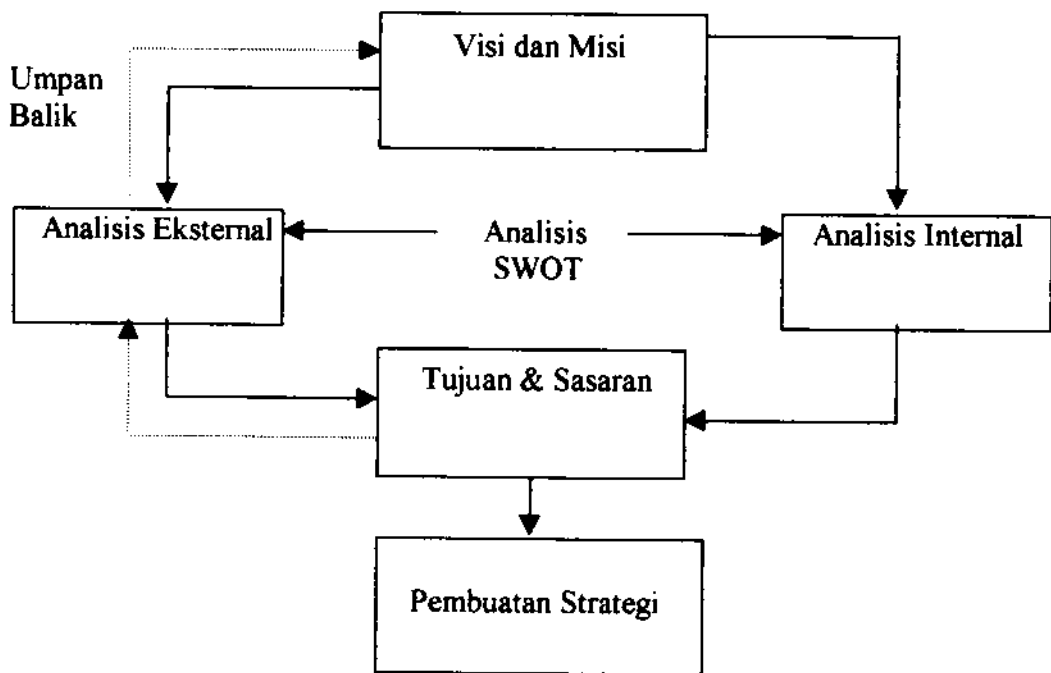
1. Perencanaan strategik yang disusun harus konsisten dengan situasi kompetisi dan transparansi yang berlangsung. Perencanaan strategik yang dirumuskan tersebut harus mampu di satu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi.

2. Perencanaan strategik perlu memperhatikan kemampuan realistik organisasi untuk melaksanakannya.
3. Perencanaan strategik yang telah di susun agar dioperasionalisasikan dengan sebaik-baiknya dengan dukungan penuh dari pimpinan puncak organisasi. Berhasil atau tidaknya rencana strategik bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang menentukan turun tangan pimpinan puncak organisasi (Ismail Mochamad : 2000: 49).

### **6.3. Analisis SWOT terhadap kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Pembahasan tentang kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam membina usaha kecil/ koperasi dengan pendekatan analisa SWOT (Strength = kekuatan, Weakness = kelemahan, Opportunity = peluang dan treat = ancaman) Sebagai model analisa SWOT adalah sebagai gambar berikut :





*Diolah dari : Manajemen Strategi Agustinus SW (1996: 32)*

**GAMBAR 6.1 : MODEL ANALISIS SWOT**

### 6. 3. 1. Visi dan Misi

Sesuai uraian di muka, visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah memberdayakan gerakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Visi yang dimaksud adalah cara pandang jauh kedepan, didalamnya tercermin apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi diarahkan. Upaya memberdayakan koperasi pengusaha kecil menengah adalah dengan memberikan fasilitas, konsultasi dan advokasi guna mengembangkan kegiatan kelembagaan dan usaha. Sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah, diartikan bahwa koperasi dan pengusaha kecil menengah dimasa depan sebagai penggerak

ekonomi daerah, semua sektor usaha dilaksanakan oleh koperasi pengusaha kecil dan menengah dari hulu sampai hilir, sehingga semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh dan dari rakyat sebagai ciri ekonomi kerakyatan.

Pengertian yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan adalah tidak ada lagi perlakuan istimewa bagi pelaku ekonomi baik swasta, badan usaha milik negara, koperasi pengusaha kecil menengah dalam mewujudkan kegiatan usaha, semua diserahkan pada mekanisme pasar.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik sesuai dengan visi yang ditetapkan. Adapun misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- Memberdayakan koperasi menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, profesional.
- Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, profesional.

Memberdayakan koperasi untuk menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, profesional di maksudkan pembangunan koperasi diarahkan pada koperasi yang memiliki usaha yang sehat, yang dikelola oleh sumber daya manusia produktif, profesional, berdaya saing dan berwawasan lingkungan serta tidak terpengaruh oleh gejolak perekonomian yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur.

Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah menjadi bagian institusi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, profesional, dimaksudkan

pembangunan dan pembinaan pengusaha kecil menengah diarahkan pada sumber daya manusia yang produktif dan profesional berdaya saing, berwawasan lingkungan serta tidak tergoyahkan oleh gejolak perekonomian yang tidak terprediksi.

### **6. 3. 2. Analisis Internal**

#### **a. Faktor kekuatan**

- Adanya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- Adanya peraturan daerah nomor : 10 tahun 1999 tentang Kewenangan daerah.
- Adanya peraturan pemerintah No. 44 tahun 1999 tentang Kemitraan.
- Terbitnya peraturan daerah nomor : 3 tahun 2001 tentang Organisasi dinas daerah junto Keputusan Bupati nomor 21 tahun 2001 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- Data usaha kecil/ koperasi binaan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah sejumlah 658 usaha kecil menengah dan 318 koperasi.
- Kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam membina usaha kecil/ koperasi.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa :

1. Kuantitas sumberdaya manusia apaturatur baik : jumlah 39 orang mengalami penambahan  $\pm 30\%$  dari tahun sebelumnya. Unsur pimpinan sejumlah 22 orang, naik 69, 23 % dibanding tahun sebelumnya karena Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah naik dari eselon IIIb menjadi IIb kualitas sumber daya manusia apaturatur baik :
  - Golongan kepangkatan, IV = 7, III = 27, II = 5 orang.
  - Pendidikan, S2 = 4, SI = 13, SMTA = 18 orang.
  - Pendidikan teknis perkoperasian, pejabat = 20, staf = 6 orang.
  - Pengalaman bekerja :
    - 1 - 9 tahun 6 orang
    - 10 - 19 tahun 27 orang
    - 20 - 29 tahun 6 orang
2. Sarana-prasarana keadaan sedang, dari 39 macam sarana prasarana penunjang kegiatan 12 dapat digunakan (34,5%) dan 17 lainnya rusak (58,6%).
3. Program kerja, keadaan baik, dari 6 program/ perencanaan 4 program dapat dilaksanakan dengan baik sedangkan 2 program dilaksanakan sedang atau belum efektif.

Dana anggaran dari APBD II 2001 keadaanya kurang, yaitu Anggaran rutin, sebesar Rp.555.715.000, sejumlah Rp.538.315.000,- belanja pegawai Rp. 17.400.000, merupakan belanja rutin non pegawai ( $\pm 0, 2\%$  dari APBD) Anggaran

pembangunan sebesar Rp. 200.000.000,- ( $\pm$  0,2 % dari APBD II). APBD Kabupaten Mojokerto 2001 Rp. 286. 000. 413. 939, 99.

**b. Faktor kelemahan**

- Kemampuan sumber daya manusia usaha kecil/ koperasi rendah. Dari penelitian 73, 03 % pengusaha kecil/ koperasi pendidikannya SD dan SMTP, (55,8%), belum pernah mendapatkan pendidikan dan pembinaan.
- Usaha kecil/ koperasi binaan tersebar di 18 kecamatan dan pada 304 desa/ kelurahan. Dari penelitian dapat diuraikan hal sebagai berikut :  
Jenis usaha 61,1% adalah non pertanian, sebagian besar modalnya kecil 59,8%, omzet perbulan 41,6% berkisar dibawah 49 juta, sebagian besar menghadapi permasalahan modal 56,9%, pemasaran 30, 5%, peralatan 6,9% dan bahan baku 5,5%.
- Sarana-prasarana keadaan sedang, dari 29 macam barang inventaris/ sarana penunjang kegiatan 17 diantaranya  $\pm$  58,6% rusak.
- Kurang digunakan sistem informasi dan teknologi maju dan tepat guna.
- Pembinaan usaha kecil/ koperasi belum efektif.

**6. 3. 3. Analisis External**

**a. Faktor peluang**

Terbitnya undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1999 tentang Kemitraan.

Adanya peluang ekspor, karena dukungan kemudahan dari pemerintah dan meningkatnya permintaan dari luar negeri. Pada tahun 2001 terdapat 9 usaha kecil menengah yang melaksanakan ekspor ke Timur tengah, Eropa barat, Afrika, Jepang sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 6.1 : DAFTAR USAHA KECIL KOPERASI TELAH MELAKSANAKAN EKSPOR**

NO.	NAMA PKM	ALAMAT	BID. USH	NILAI EKSPOR		NEGARA TUJUAN
				Vol	US\$	
1	2	3	4	5	6	7
1.	H.Supriyo	Ds.Jampirogo	sepatu	300	1731	Mesir, Arab Saudi
2.	Mujiono	Ds.Sambiroto	sepatu	300	1975	Yaman, Mesir
3.	Subagio	Ds. Tegal	patung	38400	4000	Jepang,Perancis,Belanda
4.	H.Malik	Ds. Bejijong	patung	340	700	Jepang,Perancis,Belanda
5.	Dayat	Ds. Bejijong	patung	330	600	Jepang,Perancis,Belanda,Itali
6.	M. Arif	Ds. Bjr Agung	sepatu	300	150	Filipina
7.	H. Djamil H	Ds. Kdg Pring	sepatu	5000	800	Itali, Afrika
8.	Kasnan	Ds. Bejijong	patung	310	653	Eropa, Jepang
9.	Fx. Ismunir	Ds. Cpk lima	agrops	5000	220000	Jepang

*Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah : 2001*

- Berlakunya AFTA pada tanggal 1 Januari 2003.
- Dukungan pemerintah dan DPRD terhadap pemberdayaan koperasi dan pengusaha kecil menengah sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah.
- Adanya kelompok kerja dimasing-masing wilayah binaan.
- Anggota koperasi sekaligus pengguna jasa dan produk koperasi.

**b. Faktor ancaman**

- Terjadinya persaingan kurang sehat antar usaha kecil/ koperasi dari penelitian 19 Koperasi/ KUD semuanya adalah serba usaha, belum ada yang mempunyai bidang usaha yang khusus/ khas, menyebabkan terjadi persaingan kurang sehat.
- Kurang tanggapnya binaan, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.
- Kualitas binaan yang kurang signifikan dengan kebutuhan informasi.
- Citra positif dari masyarakat tidak ada.
- Masih timbul usaha-usaha yang kurang produktif.
- Kurang dapatnya menjaga efektivitas dan efisiensi kerja maupun usaha.

**6. 3. 4. Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Menurut penelitian para ahli bahwa organisasi yang memiliki kekuatan dalam faktor-faktor kunci keberhasilannya cenderung memiliki kinerja yang baik. Faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategik sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Dengan analisis SWOT menghasilkan beberapa asumsi sebagai hasil interaksi antara kekuatan dan peluang, serta antara

kelemahan dan ancaman dengan mempergunakan analisis strategi dan pilihan dapat ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Mengenai faktor-faktor kunci keberhasilan seharusnya memenuhi kriteria :

1. Penting untuk pencapaian keseluruhan tujuan dan sasaran organisasi.
2. Dapat diukur dan dikendalikan organisasi.
3. Tidak terlalu banyak, karena tidak semua merupakan kunci.
4. Dinyatakan sebagai sesuatu yang harus dilakukan.
5. Dapat diterapkan diberbagai organisasi sejenis dengan tujuan dan strategi yang sama.
6. Bersifat hirarkis, beberapa faktor berlaku untuk keseluruhan organisasi manajemen beberapa faktor lain hanya berfokus kepada satu fungsi tertentu (Ismail Mochamad, 2000 : 1).

Faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Dengan mendayagunakan peraturan pemerintah nomor : 44 tahun 1999 tentang Kemitraan dan data usaha kecil binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang cukup akurat, serta dengan menggunakan kelompok kerja di masing-masing binaan dan anggota koperasi sekaligus pembeli dan pengguna jasa akan dapat di wujudkan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh.
2. Dengan mendayagunakan Peraturan Pemerintah nomor : 44 tahun 1999 tentang Kemitraan dan data usaha kecil binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang cukup akurat akan dapat di atasi terjadinya persaingan antara binaan guna mewujudkan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh.



3. Dengan mengatasi masalah sarana/ prasarana, anggaran yang belum cukup dan kurangnya sistem informasi dan teknologi dan memanfaatkan kelompok kerja di masing-masing wilayah binaan dan dengan terbitnya undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, maka akan dapat diwujudkan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh.
4. Dengan mengatasi masalah sarana-prasarana, anggaran yang belum cukup dan kurangnya sistem informasi dan teknologi dan menanggulangi terjadinya persaingan antara binaan dan citra positif dari masyarakat tidak ada maka akan dapat diwujudkan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh.

Analisis SWOT terhadap kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 6. 2 : ANALISIS SWOT KEMAMPUAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DALAM MEMBINA USAHA KECIL/ KOPERASI**

No.	ANALISIS SWOT				Kunci Keberhasilan
	STRENGTH (KEKUATAN) ANALISIS INTERNAL	WEAKNES (KELEMAHAN) ANALISIS INTERNAL	OPPORTUNITY (PELUANG) ANALISIS EKSTERNAL	TREAT (ANCAMAN) ANALISIS EKSTERNAL	
1.	Pelaksanaan OTODA	SDM usaha kecil/ koperasi rendah	- UU No. 22/ 1999 - UU No. 25/ 1999	Terjadinya persaingan kurang sehat	Pendayagunaan PP 44/ 99
2.	Perda Kewcnangan Daerah	Tersebar di 18 Kcc/ 304 Desa	Peluang Ekspor	Kurang tanggapnya binaan	Pemberdayaan pokja-pokja binaan
3.	PP 44/ 99 Kemitraan	Banyak permasalahan usaha kecil/ koperasi	AFTA 2002	Kualitas binaan kurang signifikan dg kebutuhan informasi	Pemberdayaan anggota koperasi
4.	Perda 3/ 2001 Jo. SK Bup 21/ 2001	Pembinaan belum efektif	Dukungan Pemda/ DPRD	Citra positif dari masyarakat tidak ada	Mengatasi persaingan tidak sehat
5.	Data UKM lengkap	Kurang digunakan sistem informasi/ teknologi maju/ tepat guna	Pokja – Pokja di wilayah binaan	masih timbul usaha – usaha kurang produktif	Mengatasi sarana – prasarana anggaran, sistem informasi, teknologi, keuangan
6.	Kemampuan Diskop : - SDM baik - Sarana – prasarana sedang - Program baik - Anggaran/ keuangan kurang	Sarana – prasarana sedang Anggaran kurang	Anggota koperasi sekaligus pengguna jasa dan produk koperasi	Kurang efektif, efisien kerja maupun usaha	Mewujudkan citra positif masyarakat
7.					Meujudkan usaha kecil koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh

#### **6.4. Analisis Akuntabilitas**

Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang lebih berdayaguna, berhasilguna bersih dan bertanggung jawab, pelaksanaan akuntabilitas kinerja setiap Instansi Pemerintah menjadi suatu sistem yang akan dilaksanakan sebagai model media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga pada masa mendatang.

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi di tentukan sejauh mana capaian pelaksanaan program kerja, dengan memperhatikan indikator-indikator masukan (*inputs*), indikator-indikator keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

##### **6. 4. 1. Indikator Capaian Pelaksanaan Program**

Indikator capaian pelaksanaan program kerja adalah sebagai berikut :

###### **a. Indikator masukan (*Inputs*)**

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa:

- Sumber daya manusia
- Sarana - prasarana
- Program kerja
- Dana/ anggaran

###### **b. Indikator keluaran (*Outputs*)**

Adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator ini dapat berupa :

- Pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji
- Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan
- Pelaksanaan Konsultasi, Advokasi
- Monitoring, evaluasi

c. Indikator Hasil (*Outcome*)

Segala sesuatu yang mencerminkan keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikatornya adalah :

- Pemahaman tentang koperasi
- Bertambahnya pemahaman pengurus, pengawas dan anggota tentang manajemen usaha koperasi
- Terbentuknya jaringan usaha, kemitraan usaha kecil/ koperasi bertambahnya pengetahuan para pengusaha kecil dan menengah

d. Indikator manfaat (*benefits*)

Segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat antara lain adalah

- Meningkatnya keanggotaan koperasi
- Meningkatnya ketrampilan mengelola usaha
- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas produksi
- Meningkatnya koperasi yang mendapatkan prestasi

e. Indikator dampak (*impacts*)

Adalah segala hal yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator dampak- dapat berupa :

- Meningkatnya pelayanan

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia pengusaha kecil/ koperasi
- Meningkatkan omzet, keuntungan, sisa hasil usaha
- Meningkatkan usaha kecil/ koperasi unggulan berpeluang ekspor

Penetapan indikator seharusnya didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta hal hal sebagai berikut :

- a. Indikator harus spesifik dan jelas
- b. Dapat diukur secara obyektif baik kualitatif maupun kuantitatif
- c. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampak
- d. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan
- e. Efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan ekonomis (Lembaga Administrasi Negara ; 1999: 8)

#### 6. 4. 2. Capaian Pelaksanaan Program

Untuk membahas tingkat pencapaian program digunakan 4 lembaran format sebagai berikut :

- a. Format Pengukuran Kinerja (Pk) dengan pedoman, apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja maka digunakan pedoman

$$\text{Capain Indikator kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana} \times 100\%)}{\text{rencana}}$$

Selanjutnya nilai capain kelompok indikator kinerja dipeoleh dengan menjumlahkan nilai capain indikator kinerja:

$$\text{Nilai Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Capaian Indik Kinerja} \times \text{Bobot Indik Kinerja}}{100 \%}$$

- b. Format Evaluasi kegiatan (Ek-1) menggunakan pedoman :

$$\text{Nilai capaian kel indik kinerja} = \frac{\text{capaian kel Indik kinerja} \times \text{bobot kel indik Kinerja}}{100 \%}$$

- c. Format Evaluasi program (Ek-2) dengan pedoman

$$\text{Nilai capaian akhir Keg} = \frac{\text{nilai capaian keg} \times \text{bobot keg}}{100\%}$$

- d. Format Evaluasi kebijaksanaan (Ek -3) dengan pedoman

$$\text{Capaian akhir prog} = \frac{\text{capaian prog} \times \text{bobot keg}}{100\%}$$

Tolok ukur capaian pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

Capain  $\pm$  85 - 100 dinilai baik

Capain  $\pm$  70 - 84 dinilai sedang

Capain < 69 dinilai kurang

Dengan pendekatan tersebut capaian pelaksanaan program Dinas Koperasi Usaba Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto tahun 2001diperkirakan sebagai berikut

- a. Kegiatan ketata usahaan (pembelanjaan) dalam kelancaran tugas dan tepat waktu (capaian) pelaksanaan program  $\pm$  71, 08 % atau sedang.

- b. Kegiatan pembinaan koperasi (peningkatan identitas koperasi sebagai badan usaha) capaian pelaksanaan program  $\pm 84,16\%$  atau baik.
- c. Kegiatan pembinaan usaha kecil menengah (optimalisasi pengusaha kecil menengah dalam penyempurnaan pasar dan permodalan) capaian pelaksanaan program  $\pm 76,26\%$  atau sedang.

#### **6. 5. Relefansi dengan Hasil Penelitian sebelumnya**

Guna melengkapi pembahasan dalam penelitian akan diperbandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

- a. Rustam effendy, 1998, mengungkapkan bahwa menghadapi era globalisasi, era persaingan bebas, usaha kecil/ koperasi perlu pembinaan dan bimbingan dari Pemerintah terutama dalam bidang : kewirausahaan, manajemen, pemasaran, keuangan dan operasional perusahaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa usaha kecil/ koperasi sangat membutuhkan pembinaan dan bimbingan Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengingat sebagian besar mereka belum pernah mendapatkan pembinaann dan bimbingan ( $\pm 55,8\%$ ), untuk usaha kecil/ koperasi baru berpotensi, produk unggulan, berpeluang ekspor sebagian besar telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dalam bidang manajemen usaha, wirausaha dan pemasaran.

- b. Jumilah Zain dan Khusnul Akhbar, 1998, dalam penelitiannya pada usaha kecil di Jawa Timur menemukan permasalahan permodalan

merupakan kesulitan yang dihadapi oleh usaha kecil bersumber pada perbankan yang mensyaratkan pemberian kredit permodalan berdasarkan kredit sehat. Persyaratan kredit sehat seperti kelayakan usaha, adanya agunan, loyalitas usaha, kemauan dan kemampuan membayar serta tertib administrasi keuangan sangat sulit dipenuhi oleh usaha kecil/ koperasi.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa usaha kecil/ koperasi menghadapi kesulitan yang berat dalam hal permodalan, pemasaran, peralatan dan bahan baku.

- c. I Nyoman Naya Sudjana, Cs, 2001, dalam penelitiannya tentang pengusaha kecil yang berbasis sumber daya lokal di beberapa Kabupaten/ Kota Jawa Timur diantara hasil temuannya adalah, bahwa latar belakang pendidikan pengusaha kecil sebagian besar adalah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. Selain itu usaha kecil menghadapi permasalahan antara lain, *manajemen trial and eror*, permasalahan modal dan pengelolaanya serta pemasaran hasil usaha. Untuk itu disarankan intervensi sistemik Pemerintah dan usaha formal dalam kegiatan usaha kecil terutama dalam masalah permodalan, tranformasi teknologi modern tepat guna.

Dari hasil penelitian ini ditemukan permasalahan yang sama bahwa sebagian besar pendidikan pengusaha kecil/ koperasi di Kabupaten Mojokerto adalah Sekolah Dasar (SD) dan SMTP  $\pm$  73, 03% sedangkan pada pengusaha kecil/ koperasi baru berpotensi/ produk unggulan berpeluang ekspor ternyata memiliki latar belakang



pendidikan rata-rata cukup tinggi yaitu SMTA ( $\pm 53, 3\%$ ), sarjana ( $\pm 6,8\%$ ) sedang lainnya SD dan SMTP. Permasalahan yang dihadapi adalah sama yaitu permodalan, pemasaran, peralatan dan bahan baku.

**BAB 7****KESIMPULAN DAN SARAN****7.1. Kesimpulan**

Bedasarkan uraian dalam pembahasan didepan maka kesimpulan yang disampaikan adalah :

1. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disertai dengan kelengkapan sumber daya manusia, perangkat pedoman tugas pokok dan fungsinya, sarana-prasarana, dana/ anggaran APBD II, serta pengembangan selanjutnya sebagai dinas daerah
2. Kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto dalam membina usaha kecil/ menengah ditentukan sejauh mana dalam memberdayakan sumber daya manusia aparatur yang ada serta sumber daya lainnya seperti sarana - prasarana, program kerja, dana/ anggaran secara efektif dan efisien.

Dari 4 (empat) indikator yang diteliti tentang kemampuan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan menengah dapat diketahui bahwa :

- a. Pemberdayaan sumber daya manusia aparatur dari aspek kuantitas dan dari aspek kualitas baik

Pendidikan teknis fungsional pejabat struktural cukup baik, pengalaman bekerja baik, program kerja 2001 dibuat dengan baik, dari 6 (enam) program yang direncanakan 4 (empat) program

berjalan efektif atau baik, sedangkan 2 (dua) program berjalan sedang/ belum efektif.

- b. Sarana-prasarana nilainya sedang, karena sebagian sarana penunjang kegiatan keadaannya kurang dipelihara dan rusak.
- c. Dana - anggaran dari APBD II 2001, keadaannya kurang, ditinjau dari perbandingan dengan keseluruhan APBD II jumlahnya tersebut kecil  $\pm 0, 2\%$ .

Sedangkan kemampuan usaha kecil/ koperasi ditinjau dari 8 (delapan) indikator yang diteliti 5 (lima) indikator nilainya kurang dan 3 (tiga) indikator sedang :

- a. Aspek tingkat pendidikan sekolah pengusaha kecil/ koperasi kurang, sebagian besar pendidikan SD/ SMTP.
- b. Aspek keikutsertaan dalam pembinaan dan penataran kurang, sebagian besar belum pernah mengikuti.
- c. Aspek jenis usaha sedang, sebagian besar berusaha di sektor pertanian.
- d. Aspek modal usaha kurang, sebagian besar memiliki modal 1 – 49 juta.
- e. Aspek omzet usaha kurang, omzet kecil.
- f. Aspek penyerapan tenaga kerja sedang.
- g. Aspek pemasaran hasil usaha kurang, pemasaran hanya di dalam negeri.
- h. Aspek permodalan sedang.

3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah seharusnya sejalan dengan paradigma baru, otonomi daerah, pemerintahan yang baik, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat penelitian ini sedang dipersiapkan untuk dilaksanakan. Melalui pendekatan sistem akuntabilitas dapat disusun perkiraan capaian tugas pokok dan fungsi atau kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto tahun 2001. Adapun capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembelanjaan dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan tepat waktu, capaian pelaksanaan program sedang.
- b. Kegiatan peningkatan identitas koperasi sebagai badan usaha, capaian pelaksanaan program baik.
- c. Kegiatan optimalisasi peran pengusaha kecil menengah dalam penyempurnaan pasar dan permodalan capaian pelaksanaan program sedang.

## 7.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengalaman selama penelitian, berikut saran-saran yang dapat di sampaikan :

1. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto di tinjau dari aspek sumber daya aparatur, program kerja cukup baik, ditinjau dari aspek sarana - prasarana sedang, ditinjau dari aspek dana/ anggaran kurang. Selanjutnya di sarankan peningkatan dukungan Pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam hal penambahan sarana – prasarana dan penambahan dana/ anggaran APBD II, pada masa mendatang, sehingga kemampuan dalam kedua aspek tersebut menjadi baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan pembinaan usaha kecil/ koperasi.
2. Pembinaan usaha kecil/ koperasi dapatnya terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya. Dari hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa:
  - a. Pembinaan usaha kecil/ koperasi di Kabupaten Mojokerto tidak hanya dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah saja, tetapi juga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta.

Pada masa mendatang tidak tertutup kemungkinan pembinaan usaha kecil/ koperasi oleh lembaga swadaya masyarakat dan pembinaan secara swadaya dan mandiri oleh usaha kecil/ kopensi sendiri. Disarankan pada masa mendatang pembinaan usaha kecil/

koperasi di koordinasikan oleh pemerintah melalui tim pembina sehingga lebih berdaya guna berhasil guna.

- b. Sebagian besar usaha kecil/ koperasi yang mendapatkan kesempatan pembinaan menunjukkan perubahan positif kearah kemajuan usaha, ketangguhan, kemandirian, bahkan berpeluang ekspor. Sementara itu usaha kecil/ koperasi yang belum pernah mendapatkan pembinaan diperkirakan masih cukup banyak.

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan DPRD untuk memberikan perhatian dan dukungan secara optimal terhadap pembinaan usaha kecil/ koperasi. Dalam hal produk hukum peraturan daerah rencana strategik 2001-2005, rencana pembangunan tahunan, peraturan daerah tentang APBD II, pedoman pelaksanaan selanjutnya dapatnya memuat hal tersebut dan ditindak lanjuti dalam pelaksanaan pembinaan usaha kecil/ koperasi pada masa mendatang.

- d. Teknis pelaksanaan pembinaan usaha kecil/ koperasi di samping menggunakan pedoman yang telah ada yaitu pedoman pembinaan usaha kecil/ koperasi dari pemerintah propinsi Jawa Timur disarankan pada masa mendatang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto untuk memperhatikan faktor - faktor, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

3. Sebagai upaya untuk memperoleh capaian pelaksanaan program kerja yang baik khususnya pembinaan usaha kecil/ koperasi di Kabupaten Mojokerto, disarankan pada masa mendatang menggunakan model

akuntabilitas kinerja, khususnya bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Model tersebut dapat menjadi referensi bagi gerakan koperasi bahwa dalam capaian pelaksanaan program keglatan pada masa mendatang hendaknya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

## DAFTAR LITERATUR

- Arikunto, Suharsimi, 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Agustinus, SUU, 1996. *Manajemen Strategik*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Baswir, Revrisond, 2000. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPFE – UGM.
- Departemen Koperasi, 1987. *Koperasi Dalam Era Efisiensi Nasional*, Jakarta : BALITBANG Departemen Koperasi.
- , 1983. *Buku Petunjuk Teknis Perkoperasian/ Pedoman Kerja*, Jakarta : Setjen Departemen Koperasi.
- , 1991. *Kebijaksanaan dan pengembangan perkoperasian*, Surabaya : Kanwil Departemen Koperasi Jawa Timur.
- , 1992. *Dengan Koperasi menuju Demokrasi ekonomi*, BALITBANG, Departemen Koperasi.
- , 1996. *Kebijaksanaan dan Pembinaan Pengusaha Kecil*, Surabaya : Kanwil Departemen Koperasi PPK.
- , 1997. *Buku Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan PPK*, Jakarta : Departemen Koperasi.
- , 2001. *Repeta ( Rencana Pembangunan Tahunan) 2001 Propinsi Jawa Timur bidang Koperasi dan PKM*, Surabaya : Dinas Koperasi dan PKM Jawa Timur.
- Dinas Koperasi Tingkat I Jatim, 1996. *Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan PKM*, Surabaya : Dinas Koperasi PKM, Jatim.
- Effendy, Onong, Unchjana, 1996. *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Effendy, Rustam, 1998. *Pengembangan usaha kecil menghadapi perdagangan bebas*, Jakarta: TAF - ISEI – PERHEPI.
- Gunardi, Seldadio, Harry dkk, 1998. *Usaha Kecil Indonesia tantangan krisis dan globalisasi*, Jakarta : TAF -- ISEI – PERHEPI.
- , 1998 *Masalah-masalah diseputar usahea kecil Indonesia*, Prosiding konprensi usaha nasional usaha kecil, Jakarta : TAF - ISEI – KADIN.



- Haryono Suyono, 2000. Pokok-Pokok Pemikiran Tentang kebutuhan SDM unggul untuk lembaga masyarakat dinamis inenyongsong era baru abad 21, Makalah Seminar, Surabaya, PSDM Unair.
- Hadari Nawawi, 1983. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gama University Press.
- Hersey, J dan Ken Blanchard, 1995. Manajemen Perilaku Organisasi, Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Terjemahan Agus Dharma, Jakarta : Erlangga Press.
- Hasibuan, Malayu, SP, 1997. Manajemen SDM, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Handoko T Hani, 2000. Manajemen Personalia dan SDM, Yogyakarta : BPFE.
- Hidayat, S, 2000. Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan tantangan kedepan, Jakarta : PT. Pustaka Quantum.
- , 1968. Kamus Administrasi, Jakarta : Universitas Gajahmada.
- Ismail Mochamad, dkk, 2000. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta LAN-BPKP.
- Internasional cooperative Alliance, 2000. Jati Diri koperasi, terjemahan Ibnu Soedjono, Jakarta : LSP21.
- Karlins, Marvin, 1993. Pendayagunaan Sumberdaya Manusia secara manusiawi, Jakarta : BALITBANG DEPDAGRI.
- Lembaga Administrasi Negara, 1999. Pedoman Penyusunan LAKIP, Jakarta : LAN.
- Macmud Zain, 2000. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, orasi promosi doktor, Jombang : Undar.
- , 1995. Perencanaan Sumber Daya Manusia, Jakarta : BALITBANG DEPDAGRI.
- Moekiyat, 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen kepegawaian), Bandung : Mandar Maju.
- Moleong, Lexy, Y, 2000. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Roesda karya.
- Miles, Matthew, B dan Huberman, A Michael, 1992. Analisa Data Kualitatif, Jakarta : UI Press.
- Nainggolan, 1987. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Surabaya : Pertja.

- Naya Sudjana, I. Nyoman,, 2000. Pengusaha Kecil yang berbasis Sumber Daya lokal, Surabaya : Unair.
- Osborn N Gaebbler, 1999. Mewirauahakan birokrasi, Rainventing government, terjemahan, Jakarta : Pt. Pustaka Biraman Pressindo.
- Pabuana Saruji, HM, 1997. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Otonomi Daerah pada Daerah tingkat II, Jakarta : DEPdagri.
- Perry Martin, 2000. Mengembangkan usaha kecil dengan memanfaatkan berbagai bentuk jaringan kerja ekonomi, terjemahan Tri Budhi Satrio, Jakarta : PT. Rajagrafindo.
- Perwadarminta, Wjs, 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Surbakti, Ramlan, 2000. Otonomi Daerah untuk pengembangan Sumber Daya Manusia, makalah seminar, Surabaya: PSDM unair.
- Sarwoto, 1979. Dasar - Dasar Organisasi Manajemen, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siagian P. Sondang, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Tilaar, HAR, 1997. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam era Global, Jakarta : PT. Gm Rasindo.
- Zain, Djumilah dan Akbar, Khusnul, 1998. Pengalaman membina usaha kecil di Jawa Timur, Jakarta : TAF - ISEI - PERHEPI.
- Undang - undang No. 1 Tahun 1945 Tentang komite Nasional Daerah.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1957 Tentang pokok-pokok Pemerintahanan Daerah.
- Undang-undang No. 18 Tahun 1965 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-undang No. 19 Tahun 1995 Tentang Usaha kecil.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN
- Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok kepegawaian.
- Ketetapan MPR - RI No. 4 / MPR/ 2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dan penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 tentang Organisasi perangkat Daerah
- Instruksi Presiden No. 18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan perkoperasian.
- Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM No. 20/ Kep/ Meneg/ XI/ 2000 Tentang Pedoman Penetapan Standart pelayanan minimal bidang Koperasi dan UKM yang, wajib dilakukan Kabupaten/ kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Surat Keputusan Bupati Mojokerto No. 21 Tahun 2001 Tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Organisasi dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

Surabaya, 26 Oktober 2001

Kepada  
Yth, Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Airlangga  
Surabaya

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilhami  
NIM : 099 913 367 M  
Program Studi : Pengembangan SDM Program Pascasarjana Unair

Memohon kepada Bapak untuk dapat memberikan surat ijin penelitian Tesis, dengan Judul Penelitian Kemampuan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Dalam membina Usaha Kecil/ Koperasi di Kabupaten Mojokerto

Alamat yang dituju kepada :

1. Bupati Mojokerto
2. Kepala Dinas Koperasi PKM Kabupaten Mojokerto

Demikian permohonan ini, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Pembimbing

Pemohon

Drs. I. Nyoman Naya, S. MA

Ilhami

Mengetahui  
KPS Program Magister

Dr. Sunarjo, dr, MS, Msc



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya - 60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, Fax.: (031) 5030076  
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL address : http://www.pasca.unair.ac.id

Nomor : 0280 /J03.4/PP/2001

30 Oktober 2001

Tempat :

Tujuan : Izin melaksanakan penelitian

Yth. Kepala Dinas Koperasi  
Pengusaha Kecil Menengah  
Kabupaten Mojokerto  
di  
MOJOKERTO

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia angkatan tahun 1999/2000 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Nama : Ilhami  
Nim : 099913367 / M  
Judul : KEMAMPUAN DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL  
MENENGAH DALAM MEMBINA USAHA KECIL/KOPERASI  
DI KABUPATEN MOJOKERTO.

Pembimbing : I Nyoman Naya Sujana, Drs., M.A.

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

Demikian dan atas bantuan Saudara kami sampaikan terima kasih.



Direktur

Bidang Akademik,

Dr. I. Laba Mahaputra, drh., M.Sc.

NIP. 30687550



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Jayanegara No. 16 Telp. 321255 Fax. 328411

MOJOKERTO 61315

Mojokerto, 8 Nopember 2001

Nomor : 500/392/406 - 111/2001  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin melaksanakan Penelitian

Kepada,  
Yth. Direktur Program Pasca Sarjana  
Universitas Airlangga  
di  
SURABAYA

Memperhatikan Surat Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 5030/JO3.4/PP/2001 tanggal 30 oktober 2001 perihal sebagaimana pada pokok surat, bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan penelitian dilakukan pada Dinas Koperasi PKM dan Usaha Kecil/ Koperasi Kabupaten Mojokerto.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala

  
Ir. HANAN MOZALI, MM

Pembina tkt. II

NIP. 070 020 225

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**JALAN JENDERAL A. YANI NOMOR 16 TELEPON 321793 - 321953**  
**MOJOKERTO ( 61318 )**

**SURAT KETERANGAN**

Untuk melakukan survey / research / KKN

Nomor : **072/593/406-205/2001**

- Isi :** 1. **SRT. REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA TANGGAL 30 OKTOBER 2001 NOMOR : 5030/J03.4/PP/2001**
- Dasar :** 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972  
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tgl. 17 Juli 1972 No. Gub. 187/1972  
 dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research / KKN oleh :
- Penanggung jawab :** PROF. DR. LABA MAHAPUTRA, drh, M.Sc  
**DIREKTUR**
- Alamat :** JL. BHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA
- Tema Acara / Survey / Research / KKN :** " KEMAMPUAN DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL MENYERANG BALAH MEMBINA USANA KECIL/KOPERASI DI KABUPATEN MOJOKERTO "
- Waktu / Tempat dilakukan Survey / KKN :** DINAS KOPERASI DAN BADAN/BINAS/BAGIAN SETDA KAB.MOJOKERTO
- Waktu Survey / Research / KKN :** 1 (SATU) BULAN
- Penyusul / Peserta Survey / Research KKN :** DRS. ILHAMI

DENGAN KETENTUAN - KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

alam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.

mentaatl ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintahan setempat.

menjaga tata tertib,, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan, menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan/ tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan, menghina agama, bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.

tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan di luar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.

setelah berakhir dilakukan survey / research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan Daerah tempat survey / research.

alam jangka waktu satu bulan setelah dilakukan survey / research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan hasil - hasilnya kepada :


1. Ketua BAPPEDA Prop. Jawa Timur  
**KEPALA BAKESBANG PROP. JAWA TIMUR**
2. Kepala **KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS KAB. MOJOKERTO**
3. Bupati Mojokerto  
**KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS KAB. MOJOKERTO**  
cq.
4. Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Lembaga yang bersangkutan
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Mojokerto.
- 6.

urat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak mememhi ketentuan - ketentuan sebagai tersebut di atas.

12 NOPEMBER 2001

Mojokerto, .....

BUPATI MOJOKERTO  
**PLT. KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**



**EKO TJANJONO, DR**  
**PEMERINTAH**  
**NIP. 010 184 540**

USAN : di Sampaikan Kepada

- Yth. 1. **Sdr. KEPALA BADAN/BINAS/BAGIAN SETDA**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**  
 2. **Sdr. KEPALA DINAS KOPERASI KAB. MOJOKERTO**  
 3. **YANG BERSANGKUTAN**

Surabaya, 12 Oktober 2001

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi PKM Kabupaten Mojokerto  
 2. Wakil Kepala Dinas Koperasi PKM Kabupaten Mojokerto  
 3. Kepala Bagian Tata Usaha  
 4. Kepala Subdin. ....  
 Dinas Koperasi PKM Kabupaten Mojokerto  
 5. Staf Pada.....  
 di  
Mojokerto

Kami adalah mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Airlangga Program Studi Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) peminatan Pemerintahan, sedang menyelesaikan tugas penyusunan Tesis.

Dalam rangka penyusunan tugas akhir/ thesis pada Program Pasca Sarjana Unair studi ilmu Pengembangan Sumberdaya Manusia peminatan Pemerintahan. Kami mohon dengan hormat bantuan Bapak/ Ibu untuk berkenan menjadi responden penelitian ini dengan cara mengisi daftar pertanyaan terlampir

Daftar pertanyaan ini bukan tes kemampuan dan bukan untuk mencari salah dan benar, melainkan hanya sebagai alat pengumpul data dalam proses penelitian ilmiah. Oleh karena itu saya memohon agar Bapak/ ibu mengisinya sendiri tanpa bantuan siapapun dengan jawaban yang sejujurnya. Jawaban Bapak/ ibu tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/ ibu baik sebagai pribadi . sekarang, maupun masa mendatang.

Kami menjamin segala kerahasiaan jawaban Bapak/ ibu dalam pengisian daftar pertanyaan karena ini hanyalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebelum mengisi daftar pertanyaan ini Bapak/ ibu kami mohon mengisi biodata sebagai berikut :



Biodata Responden

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal Lahir :
- 3. Jabatan :
- 4. Golongan/ kepangkatan :
- 5. Pendidikan
  - a. Formal (terakhir) :
  - b. Pendidikan Penjurangan (terakhir) :
  - c. Pendidikan Teknis/ Fungsional : 1.  
2.  
3.  
4.
- 6. Pengalaman Jabatan : 1.  
2.  
3.  
4

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



ILHAMI

Daftar kuisisioner I (terbuka) :

1. Menurut pendapat Bapak/ ibu/ saudara bagaimana keadaan pembinaan usaha kecil/ koperasi di Kabupaten Mojokerto saat ini.
2. Apakah Bapak/ ibu/ saudara pernah melakukan pembinaan usaha kecil/ koperasi secara langsung (hadir pribadi). Berapa kali dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
3. Permasalahan/ kendala apa yang Bapak/ ibu/ saudara temukan, dalam membina usaha kecil/ koperasi.
4. Saran apa yang dapat dikemukakan sehingga pembinaan usaha kecil/ koperasi di Kabupaten Mojokerto dapat berhasil dengan baik.
5. Sejauh mana yang Bapak/ ibu/ saudara ketahui tentang :
  - a. Tanggapan dari usaha kecil/ koperasi terhadap pembinaan yang dilakukan Dinas koperasi PKM sejauh mana.
  - b. Pembinaan terpadu terhadap usaha kecil/ koperasi yang melibatkan unsur : instansi lain, BUMN/ BUMS, Perguruan Tinggi.
6. Menurut pendapat Bapak/ ibu/ Saudara bagaimana perbandingan pelaksanaan pembinaan usaha kecil/ koperasi semasa Dinas koperasi masih bernama Kantor koperasi PKM (sebelum OTODA) dengan sekarang setelah kantor koperasi PKM menjadi Dinas Daerah ?
7. Mohon penjelasan dan pandangan Bapak/ ibu/ Saudara tentang tugas pokok dan fungsi yang saat ini sedang ditangani.
8. Menurut bapak/ Ibu/ saudara bagaimana potensi SDM Aparatur yang ada pada jajaran bapak dalam rangka pembinaan usaha kecil/ koperasi.  
Adapun tinjauan SDM aparatur tersebut dari aspek :
  - a. Pendidikan Formal (sekolah)
  - b. Pendidikan Penjenjangan
  - c. Pendidikan teknis/ Fungsional
  - d. Pengalaman kerja
9. Mohon penjelasan bapak/ ibu/ Saudara terhadap tersedianya anggaran pembinaan usaha kecil/ koperasi tahun 2001.
10. Mohon penjelasan Bapak/ ibu/ Saudara terhadap tersedianya peralatan(sarana/ prasarana) untuk pembinaan usaha kecil/ koperasi antara lain :

- a. Tersedianya kendaraan operasional
- b. Sarana/ prasarana untuk melakukan pembinaan
  - Slide/ Proyektor/ Film
  - Petunjuk/ Pedoman tertulis
- c. Sarana/ prasarana lainnya

Daftar kuisioner II (tertutup):

- Dalam mengisi kuisioner ini mohon di berikan tanda silang (X) tiap jawaban yang paling sesuai
- Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :
  - B = Baik
  - S = Sedang
  - K = Kurang

No.	PERTANYAAN	Jawaban			Keterangan/ Penjelasan singkat
		B (5)	S (4)	K (3)	
(1)	(?)				(6)
1.	<u>Program/ Rencana Pembinaan usaha kecil yang dilakukan oleh Bag' Subdin pada Dinas koperasi PKM tahun 20 2001</u>				
2.	<u>Pelaksanaan Program pembiayaan usaha kecil' koperasi.</u>				
3.	<u>Pengawasan Pembinaan usaha kecil/ Koperasi</u>				
4.	<u>Jumlah Staf yang bertugas dalam pembinaan.</u>				
5.	<u>Materi pembinaan yang diberikan:</u>				
a.	Peningkatan Akses Pasar				
b.	Peningkatan Akses terhadap modal				
c.	Kemampuan organisasi dan manajemen				
d.	Akses dan penguasaan teknologi				
e.	Kemitra Usaha				
f.	Lainya.....				
6.	<u>Pendidikan Formal Staf pada Bagian' Subdin :</u>				
a.	Pasca Sarjana (S2)				
b.	Sarjana (S1)				
c.	Diploma (D3, D2)				
d.	SMTA				
e.	Lainya.....				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	<u>Pendidikan Penjenjangan pada Bagian Subdin :</u> a. ADUM/ ADUMLA b. SPAMA c. SPAMEN				
8.	<u>Pendidikan Teknis pada Bagian Subdin :</u> a. Teknik Perkoperasian usaha kecil b. Lainnya.....				
9.	<u>Peralatan yang ada pada Bagian Subdin :</u> a. Mobil b. Sepeda Motor c. Komputer d. OHP e. Lainnya.....				
10.	<u>Anggaran Pembinaan usaha kecil tiap Bagian Subdin</u> a. Anggaran Proyek Pembinaan usaha kecil : .. b. Anggaran Proyek Pembinaan koperasi : .. c. Anggaran rutin untuk mendukung Pembinaan usaha kecil koperasi : ..				
11.	<u>Dukungan biaya dari pihak ketiga :</u> a. Dari Pusat Propinsi Daerah - ..... - ..... - ..... b. BUMN/ BUMD - ..... - ..... - ..... c. BUMS - ..... - .....				

## Daftar Usaha Kecil/ Koperasi

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Jabatan :
4. Pendidikan :
5. Nama Usaha/ Koperasi :
6. Alamat :
- Nomor Telepon :
7. Jenis Usaha :
  - a.
  - b.
  - c.
  - d.
8. Jumlah Karyawan :
9. Jumlah Modal :
  - a. Berupa Modal :
  - b. Berupa Bangunan :
  - c. Berupa Mesin/ Peralatan :
  - d. Berupa kendaraan :
  - e. Berupa Uang :
10. Omzet usaha :
11. Pemasaran :
  - a. Dalam negeri :

b. Luar negeri

-  
:-  
-  
-

12. Pendidikan/ penataran/ pembinaan yang pernah diikuti :

a.  
b.  
c.  
d.

13. Permasalahan yang dihadapi dan membutuhkan bantuan :

a.  
b.  
c.  
d.

14. Usul dan saran terhadap pendidikan/ penataran/ pembinaan yang dilakukan pemerintah/

Dinas Koperasi PKM

a.  
b.  
c.  
d.

Mojokerto,

2001



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Memimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi Dinas Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Memingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara 3848) ;
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;



- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah, adalah Kabupaten Mojokerto.
- Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Kepala Daerah, adalah Bupati Mojokerto.
- Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Sekretraris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Kepala Dinas yang didalamnya termasuk Wakil Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Cabang Dinas, adalah Cabang Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah.
- Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk Cabang Dinas dan atau UPTD.

### Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, adalah :

- a. Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Bina Marga ;
- d. Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan ;
- e. Dinas Pengairan ;
- f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
- g. Dinas Peternakan dan Perikanan ;
- h. Dinas Perkebunan dan Kehutanan ;
- i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
- j. Dinas Informasi, Arsip dan Perustakaan ;
- k. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- l. Dinas Perindustrian dan perdagangan ;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- n. Dinas Pendidikan ;
- o. Dinas Perhubungan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 4

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV

#### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama  
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendapatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi ;
- b. Membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Penetapan Obyek Pajak Wajib Pajak ;
- c. Pelaksanaan penetapan besarnya Pajak dan Retribusi Daerah ;
- d. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak dan Sarana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak ;
- e. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyeteroran Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan Asli Daerah lainnya ;
- g. Perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah Retribusi Daerah, Penerimaan Daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
- h. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum ;
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
  - 3) Sub Bagian Keuangan.

- d. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, membawahi :
    - 1) Seksi Pendaftaran ;
    - 2) Seksi Pendataan ;
    - 3) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
  - e. Sub Dinas Penetapan, membawahi :
    - 1) Seksi Penghitungan ;
    - 2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
    - 3) Seksi Angsuran ;
  - f. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
    - 1) Seksi Pembukuan Penerimaan ;
    - 2) Seksi Pembukuan Persediaan ;
    - 3) Seksi Pelaporan.
  - g. Sub Dinas Penagihan, membawahi :
    - 1) Seksi Penagihan ;
    - 2) Seksi Keberatan ;
    - 3) Seksi Pengolahan Penerimaan Sumber Lain-Lain.
  - h. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional ;
    - 2) Seksi Penggalan dan Peningkatan.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - j. Cabang Dinas ;
  - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Dinas Kesehatan

### Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesehatan.

### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program ;
- b. Pelaksanaan pemberian pembinaan dan perijinan ;
- c. Pelaksanaan penyuluhan tenaga pengolah kesehatan ;
- d. Pelaksanaan pelayanan kesehatan ;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasar, lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Wakil Kepala Dinas ;
  - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum ;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan ;
    - 4) Sub Bagian Perencanaan dan Informasi.
  - d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, membawahi :
    - 1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
    - 2) Seksi Kesehatan Khusus ;
    - 3) Seksi Obat dan Alat Kesehatan ;
    - 4) Seksi Kesehatan Swasta.
  - e. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahi :
    - 1) Seksi Pengamatan Penyakit ;
    - 2) Seksi Pencegahan Penyakit ;
    - 3) Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang ;
    - 4) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.
  - f. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan, membawahi :
    - 1) Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum, Industri, Pestisida ;
    - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
    - 3) Seksi Penyehatan Air dan Lingkungan ;
    - 4) Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
  - g. Sub Dinas Kesehatan Keluarga , membawahi :
    - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
    - 2) Seksi Gizi ;
    - 3) Seksi Kesehatan Anak dan Remaja ;
    - 4) Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
  - h. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
    - 1) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat ;
    - 3) Seksi Promosi Kesehatan Sarana dan Metode Penyuluhan ;
    - 4) Seksi Obat Tradisional, Obat Asli Indonesia.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - j. Cabang Dinas ;
  - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, terdiri dari :
    - 1) Rumah Sakit Umum Daerah ;
    - 2) Pusat Kesehatan Masyarakat ;
    - 3) Gudang Farmasi Kimia.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Dinas Bina Marga

Pasal 12

Dinas Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Bina Marga.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program ;
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- c. Pelaksanaan pemberian pembinaan dan perijinan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan serta jembatan ;
- e. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan serta jembatan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Wakil Kepala Dinas ;
  - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum ;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.

Bagian Kesebelas  
Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 36

Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.

## Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program ;
- b. Pelaksanaan pembinaan ;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis ;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ;
- e. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kekinisan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 38

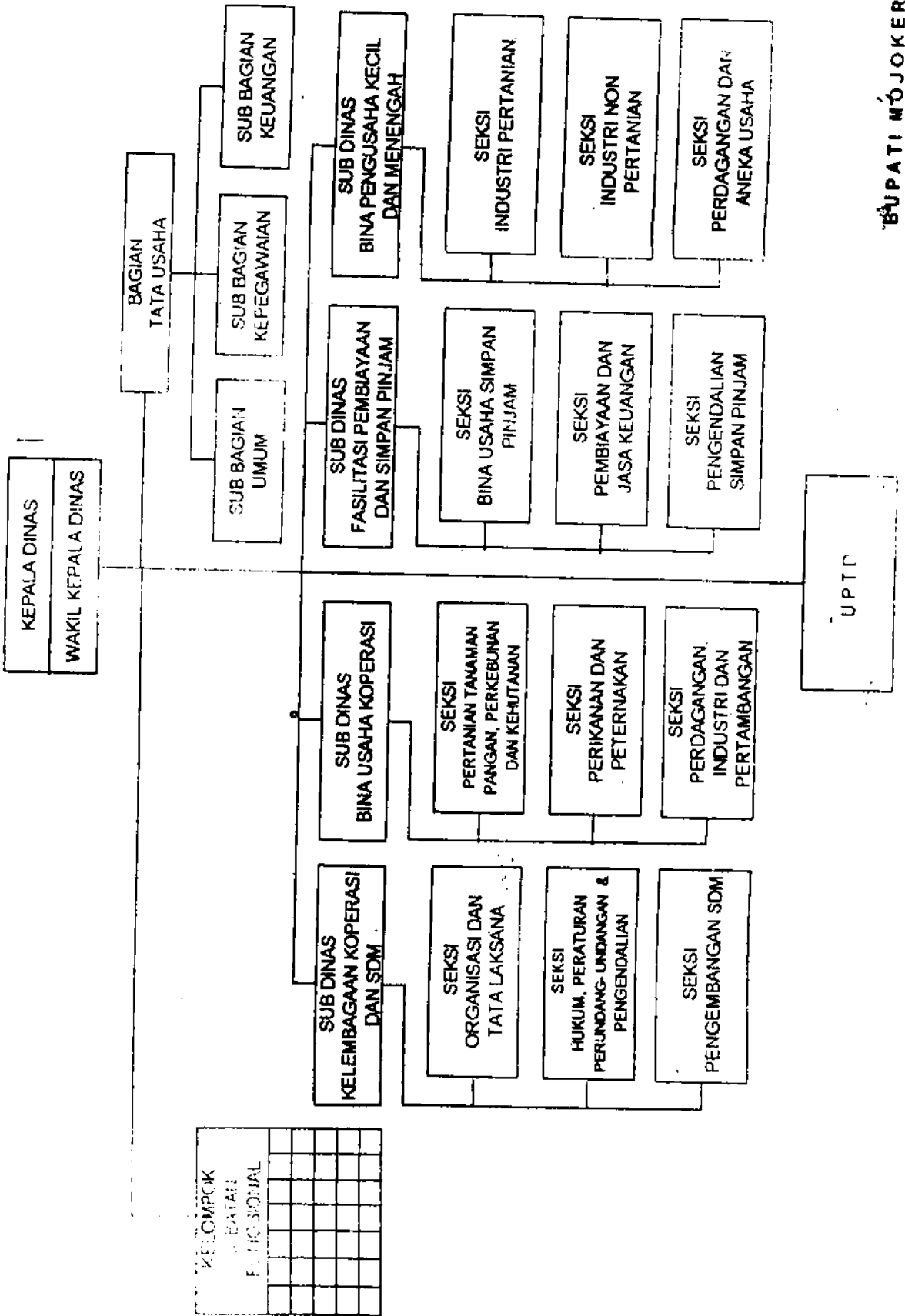
(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum ;
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
  - 3) Sub Bagian Keuangan
- d. Sub Dinas Kelembagaan Koperasi, membawahi :
  - 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana
  - 2) Seksi Hukum, Peraturan, Perancang-undangan Pengendalian
  - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- e. Sub Dinas Bina Usaha Koperasi, membawahi :
  - 1) Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan Kehutanan ;
  - 2) Seksi Perikanan dan Peternakan ;
  - 3) Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan.
- f. Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi :
  - 1) Seksi Bina Usaha Simpan Pinjam ;
  - 2) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan ;
  - 3) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.
- g. Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, membawahi :
  - 1) Seksi Industri Pertanian ;
  - 2) Seksi Industri Non Pertanian ;
  - 3) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH



BUPATI MOJOKERTO





## BUPATI MOJOKERTO

### KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

ORGANISASI DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

BUPATI MOJOKERTO,

- imbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah, maka penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3744) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor-44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

## **KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Sekretraris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Dinas yang didalamnya termasuk Wakil Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mojokerto.

## **BAB II**

### **DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH**

#### **Pasal 2**

Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah.

#### **Bagian Pertama**

#### **KEPALA DINAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya ;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan internal satuan kerja lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **BAGIAN TATA USAHA**

#### **Pasal 4**

- (1) Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Tata usaha, mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data ;
  - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tataaksana ;
  - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
  - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
  - f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan ;
  - b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
  - c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
  - d. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
  - e. Merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
  - f. Melaksanakan analisis dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;

- g. Menghimpun dan mengolah data serta dokumentasi ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas di . . . . . Jang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi : pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
- b. Menyusun formasi perencanaan pegawai ;
- c. Melaksanakan pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan me . . . . . susun laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan ;
- b. Menyiapkan usulan Anggaran Dinas ;
- c. Mengolah Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan serta realisasi APBD ;
- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas; penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**SUB DINAS KELEMBAGAAN KOPERASI**  
**DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

**Pasal 6**

- (1) Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah meliputi organisasi dan tata laksana, hukum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan kelembagaan ;
  - b. Penyusunan pedoman pembinaan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan serta manajemen ;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sumber daya manusia ;
  - d. Pelaksanaan monitoring kegiatan ;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 7**

- (1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pedoman standarisasi dan tatalaksana ;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pedoman klasifikasi koperasi ;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

(2) Seksi Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ;
- b. Memproses pengajuan permohonan akte pendirian Badan Hukum Koperasi dan pengesahannya ;
- c. Menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi, Koperasi dengan Badan Usaha lain, Amalgamasi antar Koperasi serta Merger Koperasi ,
- d. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Koperasi ;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

(3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan dan pengembangan ;
- b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia ;
- c. Melaksanakan pendidikan dan latihan serta kursus-kursus dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

#### **Bagian Keempat**

#### **SUB DINAS BINA USAHA KOPERASI**

#### **Pasal 8**

(1) Sub Dinas Bina Usaha Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan peternakan serta perdagangan, industri dan pertambangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Bina Usaha Koperasi, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha Koperasi ;
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha Koperasi ;
  - c. Pengawasan usaha dan manajemen Koperasi ;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha Koperasi ;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 9

- (1) Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi ;
  - b. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi ;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha koperasi ;
  - d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Usaha Koperasi.
- (2) Seksi Perikanan dan Peternakan, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi ;
  - b. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi ;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan manajemen koperasi ;
  - d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Usaha Koperasi.



- (3) Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi ;
  - b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman tata cara penyertaan modal ;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan manajemen koperasi ;
  - d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Usaha Koperasi.

### **Bagian Kelima**

## **SUB DINAS FASILITASI PEMBIAYAAN DAN SIMPAN PINJAM**

### **Pasal 10**

- (1) Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah meliputi bina usaha simpan pinjam, pembiayaan dan jasa keuangan serta pengendalian simpan pinjam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pedoman dalam pengembangan di bidang usaha simpan pinjam, lembaga keuangan masyarakat dan Koperasi Bank Perkreditan rakyat ;
  - b. Pembinaan, Evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan lembaga Simpan Pinjam lembaga keuangan masyarakat dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat ;
  - c. Penyiapan bahan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan ;

- d. Pelaksanaan fasilitasi penjaminan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 11

(1) Seksi Bina Usaha Simpan Pinjam, mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman atau petunjuk teknis pengembangan organisasi dan usaha simpan pinjam ;
- b. Melakukan pembinaan dan kerja untuk pengembangan organisasi dan usaha simpan pinjam ;
- c. Melakukan pembinaan pengembangan Lembaga Keuangan Masyarakat ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

(2) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan ;
- b. Melakukan pembinaan dan upaya fasilitasi permodalan usaha simpan pinjam ;
- c. Menyiapkan petunjuk jaringan usaha dan kemitraan antara Lembaga Keuangan Bank/Non Bank dengan lembaga usaha simpan pinjam ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

(3) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pengendalian kegiatan usaha simpan pinjam ;

- b. Memberikan bimbingan pengendalian intern kegiatan usaha simpan pinjam ;
- c. Melakukan pengawasan kegiatan usaha simpan pinjam ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

### Bagian Keenam

## SUB DINAS BINA PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

### Pasal 12

- (1) Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah meliputi industri pertanian, industri non pertanian serta perdagangan dan aneka usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan rencana kegiatan pembangunan, pengembangan kelembagaan dan usaha ;
  - b. Pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha ;
  - c. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam informasi bisnis ;
  - d. Pengawasan terhadap pengembangan kerjasama pembinaan usaha dan manajemen ;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 13



(1) Seksi Industri Pertanian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan ;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha ;
- c. Melakukan monitoring usaha dan manajemen ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah.

(2) Seksi Industri Non Pertanian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan ;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha ;
- c. Melakukan monitoring usaha dan manajemen ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah.

(3) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan ;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan, bimbingan kelembagaan dan usaha ;
- c. Melakukan monitoring usaha dan manajemen ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah.

**BAB III**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 14**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah diatur tersendiri.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

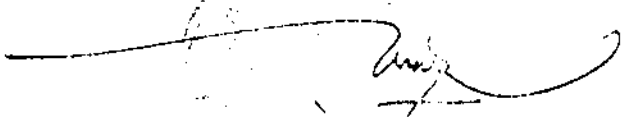
**Pasal 16**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 15 April 2001

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**ACHMADY**

**LAMPIRAN PROGRAM KERJA  
DINAS KOPERASI PKM KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2001**

No.	BIDANG	KEGIATAN
<b>I</b>	<b>BAGIAN TATA USAHA</b>	
1.	Sub Bagian Kepegawaian	a. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian b. Menyusun formasi perencanaan pegawai c. Melaksanakan pengembangan karir, kesejahteraan, peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
2.	Sub Bagian Umum	a. Melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol c. Melaksanakan analisis kebutuhan barang d. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data e. Merumuskan dan menyusun program f. Melaksanakan analisis dan pengendalian g. Menghimpun dan mengelola data serta dokumentasi h. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan/ TU i. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
3.	Sub Bagian Keuangan	a. Menghimpun/ mengelola data anggaran rutin/ pemb b. Menyiapkan usulan anggaran dinas c. Mengelola TU Keuangan/ pembukuan APBD d. Melakukan pembayaran gaji dan lain-lain e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
<b>II.</b>	<b>SUBDIN KELEMB</b>	
1.	Seksi ORTALA	a. Menghimpun data laporan perkemb koperasi/ KUD b. Menyusun bahan pelaks klasifikasi Koperasi/ KUD c. Membuat perangkaan/ keragaan Koperasi/ KUD d. Bimbingan/ konsultasi org serta tata laksana kop/ KUD e. Pembinaan Koperasi wajib RAT f. Bimbingan Koperasi yang belum melaksanakan RAT g. Evaluasi dan monitoring
2.	Seksi Hukum, PerUU	a. Sosialisasi UU dan peraturan tentang Koperasi b. Memproses pengajuan permohonan Badan Hukum c. Standarisasi/ kemitrausahaan, amalgamsi/ merger kop d. Mengendalikan/ mengawasi pertumbuhan Koperasi e. Membuat evaluasi dan laporan
3.	Seksi Pengembangan SDM	a. Penyusunan bahan penyuluhan pengembangan SDM b. Penyuluhan dan pengemb SDM koperasi dan PKM c. Kegiatan latihan dan kursus-kursus
<b>III.</b>	<b>SUBDIN BINUS KOP</b>	
1.	Seksi PTPPK	a. Penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi b. Pemantapan dan pengembangan usaha Koperasi c. Pengawasan usaha dan manajemen usaha Koperasi d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan
2.	Seksi Perik dan Peternakan	a. Penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi b. Melaksanakan pemantapan dan pengembangan usaha c. Melakukan pengawasan usaha dan manajemen usaha d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan

3.	Seksi Perdg Ind/ Pertamb	a. Menyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi b. Penyusunan pedoman tata cara penyertaan modal c. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan manajemen d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan
IV. SUBDIN FSSP		
1.	Kasi Binus Simpan Pinjam	a. Menyusun pedoman/ petunjuk teknis org/ TU USP b. Pembinaan pengembangan organisasi USP c. Melakukan pembinaan pengembangan LKM d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan
2.	Kasi Pemb/ jasa keuangan	a. Menyiapkan bahan pembinaan b. Melakukan pembinaan/ upaya fasilitasi permodalan USP c. Petunjuk jaringan ush/ kemitraan dengan lembaga keu d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan
3.	Kasi pengendalian SP	a. Pedoman pengendalian kegiatan usaha simpan pinjam b. Bimbingan pengendalian intern kegiatan USP c. Melakukan pengawasan kegiatan usaha simpan pinjam d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan
V. SUBDIN BINUS UKM		
1.	Seksi Industri Pertanian	a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan c. Melaksanakan monitoring usaha dan manajemen d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan
2.	Seksi Industri Non Pert	a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan c. Melaksanakan monitoring usaha dan manajemen d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan
3.	Seksi perdagangan/ an. js	a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan c. Melaksanakan monitoring usaha dan manajemen d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan

**Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah : 2001**

**LAMPIRAN PERENCANAAN STRATEGIK – 1 TAHUN 2001**  
**DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MOJOKERTO**

No.	BIDANG/ TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN		
			KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tata usaha Meningkatkan tertib administrasi didukung sarana yang layak	Tercapainya 3 tugas pokok bagian tata usaha	Melaksanakan kegiatan pem belanjaan	Melaksanakan kegiatan dalam rangka kelancaran tugas dan tepat waktu	Belanja barang Belanja pemeliharaan Perjalanan Dinas Belanja pegawai
2.	Usaha koperasi Meningkatkan kualitas/ kuantitas koperasi menjadi perusahaan menengah baru	Terciptanya kelembagaan koperasi berdasar prinsip/ nilai dasar koperasi	Memantapkan identitas koperasi sebagai badan usaha	Meningkatkan pemahaman kelembagaan koperasi	Penyuluhan/ publikasi Advokasi/ konsultasi Pembinaan kelembagaan
	Meningkatkan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja	Terwujudnya peningkatan potensi koperasi	Mengembangkan kerja sama usaha koperasi	Menyempurnakan penataan kelembagaan koperasi	Penyusunan profil klasifikasi koperasi
	Mengembangkan komoditi ekspor/ komoditisubstitusi impor untuk meningkatkan penanaman / penghematan devisa	Terciptanya jaringan usaha koperasi baru sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan kepada anggota/ masyarakat	Mengembangkan organisasi manajemen		Bimbingan Administrasi/ persiapan penilaian koperasi berprestasi
			Pengembangan kualitas keanggotaan Pemberdayaan gerakan koperasi		Monitoring/ evaluasi/ pembinaan teknis kelembagaan koperasi
			Pemantapan identitas koperasi sebagai badan usaha pengembangan kerjasama usaha	Pengembangan usaha ekonomi	Koordinasi penyusunan program ekonomi rakyat



1	2	3	4	5	6
				<p>Pemberdayaan KOP/ KUD penghasil pangan</p> <p>Pembinaan/ pelatihan proposal</p> <p>Pengamanan kredit program/ non program</p> <p>Meningkatkan, pengelolaan, proses, pemasaran/ pengembangan usaha pangan</p> <p>Meningkatkan manajemen Adm. Keg. Usaha</p> <p>Membina pengurus/ pengawas dalam laporan keuangan</p> <p>Pelayanan informasi pasar dan dunia usaha</p> <p>Pembinaan/ pelatihan SP, KSP/ USP</p> <p>Pemantapan manej SP sesuai PP 9/ 95</p> <p>Penilaian kesehatan KSP/ USP</p>	<p>Sosialisasi dg instansi terkait/ kelompok tani</p> <p>Koord. Instansi terkait/ Bank</p> <p>Koord/ evaluasi instansi terkait dengan Bank</p> <p>Magang, temu usaha, temu kemitraan</p> <p>Koord mendorong investasi</p> <p>Bimbingan RAT</p> <p>Koordinasi pengembangan jaringan usaha</p> <p>Bintek kelembagaan KSP/ USP</p> <p>Penilaian kesh koperasi sertifikasi kesh KSP/ USP</p> <p>Penyusunan kertas kerja KSP/ USP</p>
<p>3.</p> <p>Fasilitasi pembiayaan simpan pinjam</p> <p>Meningkatkan kualitas/ kuantitas keg. Simpan pinjam</p>	<p>Terwujudnya 95 koperasi produktif sehat</p>	<p>Melaksanakan kegiatan pe nilaian simpan pinjam</p> <p>Koordinasi dengan lembaga keuangan lain</p>			

1	2	3	4	5	6
4.	Pengusaha kecil/ menengah Meningkatkan kualitas peng usaha kecil menjadi peng usaha menengah	Tercapainya kelembagaan, asosiasi, badan hukum	Memberikan kesempatan berusaha/ perlakuan sama bagi semua pengusaha	Identifikasi PKM dan penciptaan jaringan usaha	Identifikasi PKM baru/ potensi unggulan/ peluang ekspor Pengembangan akses permodalan dengan BUMN Pembentukan kelompok sejenis menjadi pra koperasi Pelatihan ketrampilan manajemen ush kelompok produktif
	Meningkatkan kesempatan/ penyerapan kerja	Meningkatkan potensi UKM	Optimalisasi peran Pemeringkatan dalam menyempurnakan pasar		Rapat koordinasi dan laporan
	Mengembangkan ekspor/ komoditi substitusi impor	Kerjasama/ jaringan usaha PKM	Menumbuhkan kemitraan UKM dan usaha besar		Bantuan peralatan teknis produksi, pengrajin, pigora, gyp sum, bordir BinteK permodalan, manajemen usaha, produksi dan pemasaran Temu pengembangan kemitraan kerja sama PKM dengan pengusaha baru
		Terwujudnya PK mandiri, pengusaha menengah		Meningkatkan produktivitas pengusaha kecil dan menengah	Promosi dagang industri suapervis/ monitoring/ evaluasi
					Peningkatan kemampuan usaha kelompok produktif menjadi lembaga koperasi

Sumber data : Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah : 2001